



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30 Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km² (2,21%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km² (97,79%). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.

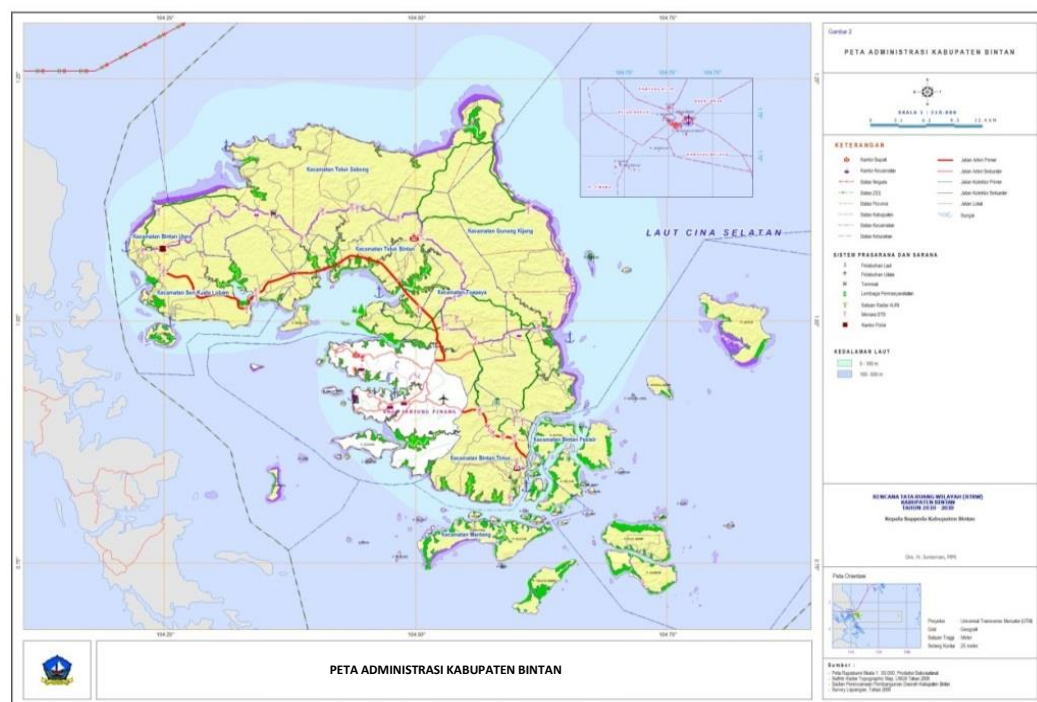
Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Tambelan.

2.1.2 Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Bintan memiliki 241 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;
- Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 2.1.
Peta Administratif Kabupaten Bintan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, tahun 2011-2031

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

1. Topografi

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0-50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0-3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%-15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%-40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

2. Geologi

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama **"Paparan Sunda"**. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetus daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian Utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil.

3. Jenis Tanah

Persebaran jenis tanah di Pulau Bintan didominasi oleh komposisi jenis tanah Hapludox-Kandiudult-Dystropets (46,4% dari luas daratan Pulau Bintan) yang tersebar seluruh bagian Kabupaten Bintan. Dominasi kedua adalah jenis tanah dengan komposisi Hapludox-Kandiudults (27,6% luas daratan) dan tersebar di daerah Berakit dan Sungai Kawal. Sedangkan komposisi jenis tanah lainnya adalah Sulfaquents-Hydraquents-Tropaquets (9,9% dari luas daratan Pulau Bintan) tersebar di pesisir pulau dan terluas di pesisir daerah Teluk Bintan, Hapludox-Dystropets-Tropaquods (9,7%) tersebar di daerah Teluk Bintan, Tropaquents-Fludaquents (3,2%) tersebar di sekitar Sungai Kawal daerah Bintan Timur dan Gunung Kijang, dan komposisi tanah Kandiudults-Dystropets-Tropaquents seluas 2,4% yang tersebar di daerah pegunungan, yaitu Gunung Kijang, Lengkuas dan Gunung Bintan. Sedangkan komposisi jenis tanah yang ada di gugusan Kepulauan Tambelan adalah Dystropets-Tropudults-Paleudults, Tropudults-Dystropets-Tropothods dan Kandiudult Kandiudox.

4. Hidrologi dan Hidrogeologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 Km² dan DAS Kawal seluas 93,0 Km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau **mixed tide prevailing semidiurnal** (wyrcki,1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya.

Hasil prediksi pasut menggunakan **Oritide-Global Tide Model** di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari :

a) Air Bawah Tanah Dangkal

Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan **aluvium** dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasir yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (**unconfined aquifer**) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasir. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.

b) Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (***unconfined aquifer***), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (***confined aquifer***) atau semi tertekan (***semi confined aquifer***), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.

c) Mata air

Keterdapatn mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan.

5. Iklim

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama periode Tahun 2010-2015 temperatur rata-rata terendah 23,9°C dan tertinggi rata-rata 31,8°C dengan kelembaban udara sekitar 85%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu :

Bulan Desember-Pebruari : Angin Utara

Bulan Maret-Mei : Angin Timur

Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan

Bulan September-November : Angin Barat



Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan Desember-Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada di setiap pulau Kabupaten Bintan dengan luas 4.490,60 Ha, Sedangkan pemanfaatan yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha.

Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Luasan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)		%
		Darat	Perairan	
A.	Kawasan Lindung	34.935,06	15.519,42	33,68
1	Hutan Lindung	4.781,97		3,19
2	Kawasan Perlindungan Setempat	21.026,12		14,04
3	Daerah Perlindungan Laut		333,62	0,22
4	Danau	1.083,38		0,72
5	Waduk/Kolong	607,59		0,41
6	Lamun		2.364,85	1,58
7	Terumbu Karang		12.820,95	8,56
8	Mangrove	7.435,99		4,96
B.	Kawasan Budidaya	97.910,14	2.951,55	67,33
1	Hutan Produksi	9.236,41		6,17
2	Pertanian	22.237,63		14,84
3	Perkebunan	9.284,78		6,20
4	Pertambangan	7.029,12		4,69
5	Industri	8.831,67		5,90
6	Pariwisata	22.307,22		14,89
7	Permukiman	12.524,04		8,36
8	Zona Bandar Udara	107,06		0,07
9	Kawasan Bandar Seri Bentan	4.843,21		3,23
10	Zona Pelabuhan		2.951,55	1,97
11	TPA	4,70		0,004
Total		131.340,92	18.470,97	100,00
		149.811,88		

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan Tahun, 2011-2031

Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan.

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun internasional, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus* spp), kakap (*Lutjanus* spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

2.1.4 Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan dan merupakan pulau pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan **Pulau Bintan** (untuk industri pariwisata).

Salah satu ancaman yang paling mengemuka dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut.

Penambangan pasir ini tentu akan memunculkan permasalahan baru dan besar, yaitu terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat ketiga negara (Indonesia, Singapura, dan Malaysia).

Permasalahan lain adalah ada indikasi dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.



Dari sisi budaya, substansi budaya masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau tercermin antara lain melalui sistem ilmu pengetahuannya yang kompleks, dengan berbagai macam aplikasi ilmu di tengah sistem sosial yang terbentuk. Substansi nilai didominasi oleh nilai etika dan estetika budaya Melayu. Nilai estetika tampak ketika etika kehidupan dijabarkan dalam bentuk ungghahan puisi yang dikenal sebagai Gurindam Duabelas.

Di sisi lain, etos kerja masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan, karena yang bekerja di sektor formal dan informal belum menggambarkan semangat kerja yang membanggakan.

Perusahaan swasta sebenarnya juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang telah dilakukan.

Program-program tersebut merupakan wujud dari tanggung-jawab sosial perusahaan (*CSR-Corporate Social Responsibility*) yang bertujuan : membantu meredam konflik yang telah dan atau mungkin terjadi terkait dengan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan telah ada kesepakatan mengenai Rencana Tahunan yang meliputi :

- 1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, Tujuannya adalah mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan, dan mulai mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah.



- 2) **Bidang Angkutan Antar Pulau,** Mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara International Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional.
- 3) **Bidang Infrastruktur,** dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparatur untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) **Bidang Pertanian dan Perkebunan,** yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (Saprotan) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian – perkebunan.
- 5) **Meningkatnya kesejahteraan,** masyarakat Kepulauan Riau Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan.
- 6) Keterlibatan perusahaan migas yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis.
- 7) **Bidang pengembangan perbatasan,** Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

Sementara itu, Rencana Jangka menengah (2013 – 2018) Kepulauan Riau meliputi:

- 1) **Bidang Pariwisata**, meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW (Obyek Daerah Tujuan Wisata) yang ada di kabupaten/kota dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi, serta mengadakan pelatihan dan pendidikan. Juga perlu terus melakukan promosi objek wisata Kepulauan Riau.
- 2) **Bidang Sumber Daya Energi**, dengan potensi migas terus diupayakan peningkatan penerimaan dan hasilnya sehingga kemampuan keuangan daerah terus meningkat.
- 3) **Bidang Perikanan dan Kelautan**, dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan sektor perikanan dan kelautan dengan penyediaan berbagai fasilitas. Pembangunan fasilitas penunjang dan penyederhanaan peraturan/ijin juga perlu dilakukan untuk menjadi daya tarik bagi investor.
- 4) **Bidang Kesehatan**, dengan melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan.

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bintan tidak termasuk kedalam wilayah potensi rawan bencana besar / masif seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah sebagaimana yang dialami pada daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/ Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada.

Status bencana yang terjadi selama periode tahun 2012 – 2017 adalah kebakaran semak belukar dengan frekwensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Hal ini terjadi karena musim panas yang membuat kebun ataupun semak belukar kering sehingga mudah terbakar apabila orang melakukan pembukaan lahan untuk kebun.

Tabel 2.2.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Tahun 2012-2017

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

A. Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Bintan priode 2012 – 2017

Secara umum bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan pada Tahun 2011 sebanyak 65 kejadian yang terdiri dari bencana kebakaran hutan/semak belukar sebanyak 63 kali kejadian, dan bencana kebakaran pada rumah penduduk sebanyak 2 kali kejadian (2 unit rumah) rumah. Sedangkan untuk bencana alam lainnya adalah banjir yang merendam lahan seluas 16 Ha.

- Pada tahun 2012 Sebanyak 41 kasus Kebakaran Hutan/semak belukar, Kebakaran Rumah penduduk sebanyak 2 kali kasus (2 unit rumah), Kebakaran Mobil sebanyak 3 kasus, Angin Puting Beliung di Kec. Bintan Timur 1 kasus (rusak 1 rumah), Kec. Teluk Bintan 1 Kasus (rusak 1 rumah), Kec. Mantang 1 kasus (rusak 12 rumah), dan Sambaran Petir di Kec. Bintan Timur 2 kasus (rusak 2 rumah), Bintan Pesisir 1 kasus (meninggal 1 orang, luka-luka 10 rang).



- Pada tahun 2013 dapat dilaporkan bahwa jumlah bencana yang terjadi sebanyak 49 kasus (Rata-rata hampir 4 peristiwa perbulan atau hampir setiap minggu terjadi 1 peristiwa bencana yang terdiri bencana kebakaran, angin kencang dan banjir). Adapun Jumlah korban yang tercatat, sebagai berikut: korban meninggal dunia 2 jiwa, korban Luka-luka 1 jiwa, dan sedikitnya 161 jiwa yang perlu perawatan sedang dan ringan.
- Dari kerusakan yang dialami, Nilai kerugian yang ditimbulkan ditaksir sebesar Rp. 386.125.500.
- Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa jumlah bencana yang terjadi tercatat sebanyak 188 kejadian bencana, kejadian yang menyolok adalah kebakaran semak belukar dengan frekwensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Hal ini terjadi karena musim panas yang membuat kebun ataupun semak belukar kering sehingga mudah terbakar apabila orang melakukukan pembukaan lahan untuk kebun.
- Untuk tahun 2016 penanganan bencana sebanyak 143 kasus. Dan didominasi kasus kebakaran yang ditangani sebanyak 119 kejadian. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik dan seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.
- Pada tahun 2017 telah terjadi 60 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%. Dibawah ini dapat dilihat rekaitulasi penanganan bencana di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2017.

B. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Agar tercapai tujuan yaitu menghindari terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten Bintan mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang difokuskan pada:

- a. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu (pra bencana)
 1. Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan
 2. Perencanaan Partisipatif dan Pengaturan Penanggulangan bencana
 3. Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan
 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Bencana
 5. Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 6. Peringatan Dini
 7. Kesiapsiagaan
- b. Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana (tanggap darurat)
- c. Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik (pasca bencana)

Apabila teridentifikasi terdapat potensi bencana yang akan terjadi maka dilakukan tindakan berupa langkah kesiapsiagaan seluruh jajaran aparat pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda milik masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Selain itu tindakan ini juga akan memudahkan upaya tanggap darurat apabila bencana itu terjadi sehingga peran semua pihak dapat berjalan efektif berdasarkan sistem yang telah dirancang dan disepakati bersama.

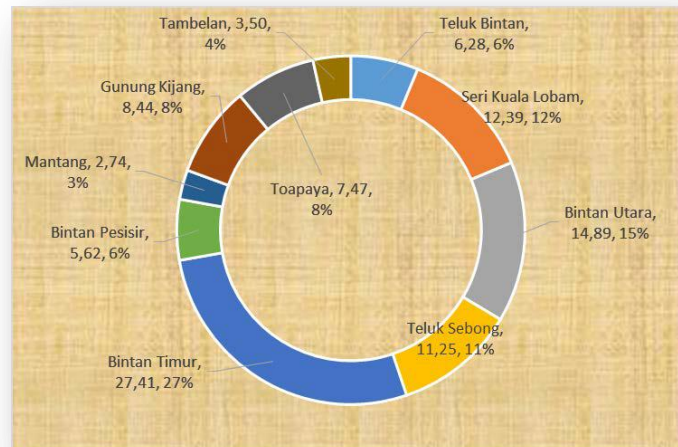
2.1.6 Demografi

A. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan tahun 2017 berjumlah sebesar 156.313 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 80.403 jiwa (51,43%) dan penduduk perempuan sebesar 75.910 jiwa (48,56%). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) sebesar 105,92. Artinya setiap 100 perempuan berbanding dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 5,92% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 42.844 jiwa (27,40%), sedangkan yang terendah adalah dikecamatan Mantang sebanyak 4.232 jiwa (2,73%).

Gambar 2.2.

Grafik Sebaran Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2018



Pemerintah Kabupaten Bintan

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teluk Bintan	5.188	4.623	9.811
Bintan Utara	8.757	10.612	19.369
Teluk Sebong	11.612	11.669	23.281
Seri Kuala Lobam	9.306	8.285	17.591
Bintan Timur	22.178	20.666	42.844
Gunung Kijang	4.794	3.998	8.792
Mantang	2.323	1.956	4.279
Bintan Pesisir	7.179	6.009	13.188
Toapaya	6.258	5.423	11.681
Tambelan	2.808	2.669	5.477
2017	80.403	75.910	156.313
2016	79.576	75.008	154.584
2015	78.824	74.196	153.020
2014	77.909	73.214	151.123
2013	76.903	72.217	149.120

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2018

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017 LPP Kabupaten Bintan sebesar **1,11%**.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan,
Tahun 2016-2017

No	Kelompok Umur	Tahun	
		2016	2017*
1.	0-4	16.687	16.801
2.	5-9	16.939	17.119
3.	10-14	14.437	14.655
4.	15-19	10.406	10.548
5.	20-24	10.794	10.828
6.	25-29	15.531	15.601
7.	30-34	16.343	16.433
8.	35-39	14.211	14.325
9.	40-44	11.396	11.530
10.	45-49	8.656	8.808
11.	50-54	6.112	6.243
12.	55-59	4.548	4.658
13.	60-64	3.380	3.457
14.	65-69	2.361	2.433
15.	70+	2.783	2.874
Jumlah		154.584	156.313
Dependency Rasio		54,04	51,93

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2018

Sedangkan Angka beban ketergantungan (**Dependency Ratio**) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2016 mencapai 52,48 dan terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 yang diestimasi sebesar 52,60. Artinya bahwa pada tahun 2017, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 53 penduduk usia belum/tidak produktif. Angka dependency ratio nya cukup tinggi. Provinsi angka dependency rasionya hanya 20-30.



B. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan berdasarkan persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan, Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2017 masih di dominasi sektor pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor perikanan, walaupun sektor pertanian masih menempati urutan pertama dalam mata pencaharian penduduk, akan tetapi dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,11%; sedangkan pada beberapa sektor lainnya terjadi pergeseran struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan. Pada urutan kedua yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan hotel terus mengalami perkembangan yang positif dimana pada tahun 2014 hanya menempati urutan ketiga dengan persentase 19,01% sedangkan pada tahun 2017 menjadi 21,27%. Angka ini berfluktuatif setiap tahunnya; hal ini disebabkan karena berkembangnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Bintan sehingga terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan khususnya sektor pariwisata. Pada tahun 2017 sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,2% dari 21,07% menjadi 20,87% pada tahun 2017. Sektor industri pengolahan juga mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 tercatat sebesar 12,28% menjadi 14,30% pada tahun 2017, sehingga menempati urutan ke empat pada tahun 2017. Selanjutnya diikuti oleh sektor Bangunan sebesar 11,26%, Keuangan, Asuransi & Usaha Persewaan Bangunan, Angkutan Pergudangan dan Komunikasi sebesar 3,73% dan sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 0,68% serta sektor Pertambangan dan Penggalan yang tercatat 23,21%.

Tabel 2.5.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin

No	Mata Pencaharian Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian Perkebunan Kehutanan & Perikanan	28,82	9,00	23,21
2.	Pertambangan dan Penggalan	0,94	0,00	0,67
3.	Industri pengolahan	12,10	19,88	14,30
4.	Listrik, Gas dan Air	0,95	0,00	0,68
5.	Bangunan	15,45	0,61	11,26
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	15,60	35,65	21,27
7.	Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi	4,95	0,62	3,73
8.	Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan	3,47	5,40	4,01
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,73	28,84	20,87
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Sakernas 2017 BPS Kabupaten Bintan

Tabel 2.6.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2017

No	Mata Pencaharian Penduduk	2014	2015*	2016	2017
1.	Pertanian Perkebunan Kehutanan & Perikanan	25,32	24,80	24,80	23,21
2.	Pertambangan dan Penggalan	1,02	1,48	1,48	0,67
3.	Industri pengolahan	12,28	17,96	18,82	14,30
4.	Listrik, Gas dan Air	1,47	0,26	0,49	0,68
5.	Bangunan	8,09	6,00	6,00	11,26
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	19,01	23,36	25,09	21,27
7.	Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi	6,59	4,53	4,31	3,73
8.	Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan	5,15	2,33	0,51	4,01
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	21,07	19,28	18,50	20,87
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

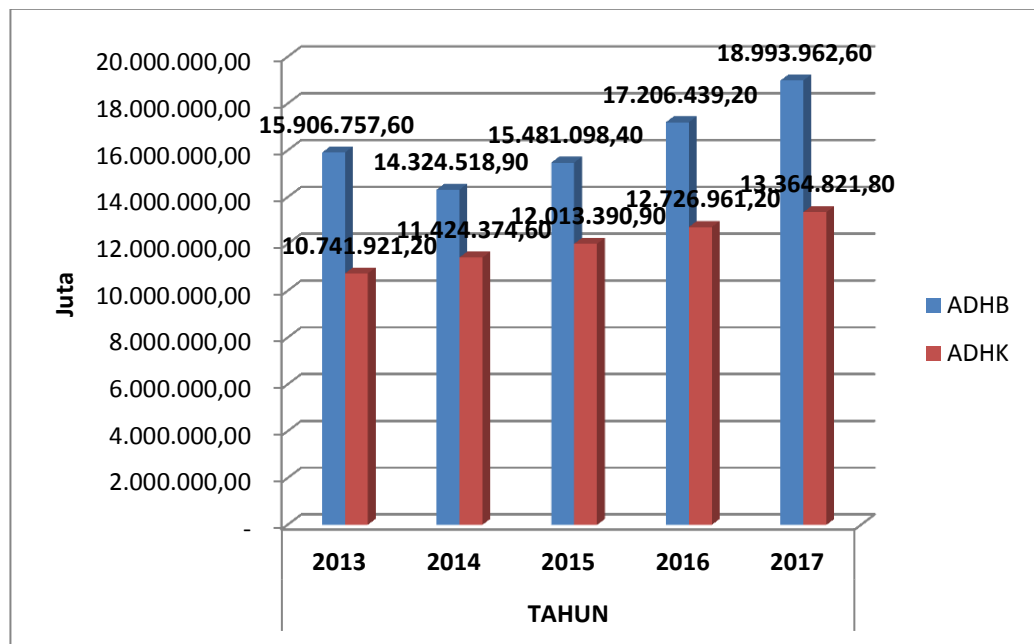
A. Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Gambar 2.3.

Grafik Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Bintan (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Bintan Dalam Angka 2018 (data diolah)

Tabel 2.7. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun									
		2013	%	2014	%	2015	%	2016*	%	2017**	%
Sektor Primer		3.005.484,40	18,89	2.925.763,80	20,42	2.981.672,50	19,26	2.985.933,10	17,35	2.868.728,70	15,10
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	986.548,30	6,20	863.474,60	6,03	986.548,30	6,37	1.129.542,40	6,56	1.217.953,60	6,41
2	Pertambangan dan Penggalian	2.018.936,10	12,69	2.062.289,20	14,40	1.995.124,20	12,89	1.856.390,70	10,79	1.650.775,10	8,69
Sektor Sekunder		8.588.779,10	53,99	7.644.689,40	53,37	8.588.779,10	55,48	9.765.319,30	56,75	11.010.903,80	57,97
3	Industri Pengolahan	6.058.197,70	38,09	5.416.883,40	37,82	6.058.197,70	39,13	6.780.541,60	39,41	7.632.964,10	40,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.644,00	0,12	17.964,90	0,13	18.644,00	0,12	21.928,00	0,13	24.500,90	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.725,60	0,05	7.904,30	0,06	8.725,60	0,06	9.649,30	0,06	10.439,40	0,05
6	Konstruksi	2.503.211,80	15,74	2.201.936,80	15,37	2.503.211,80	16,17	2.953.200,40	17,16	3.342.999,40	17,60
Sektor Tersier		4.312.494,10	27,11	3.754.065,70	26,21	3.910.646,80	25,26	4.455.186,80	25,89	5.114.330,10	26,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.314.176,10	8,26	1.170.386,10	8,17	1.314.176,10	8,49	1.479.545,60	8,60	1.696.234,10	8,93
8	Transportasi dan Pergudangan	343.478,20	2,16	293.307,80	2,05	343.478,20	2,22	398.823,80	2,32	454.118,60	2,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	818.811,00	5,15	696.556,50	4,86	818.811,10	5,29	957.353,40	5,56	1.112.661,70	5,86
10	Informasi dan Komunikasi	686.582,10	4,32	579.629,30	4,05	180.696,30	1,17	193.809,30	1,13	218.692,50	1,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	132.228,90	0,83	116.927,20	0,82	236.267,30	1,53	268.701,50	1,56	306.796,50	1,62
12	Real Estate	166.980,90	1,05	149.350,00	1,04	166.980,90	1,08	188.521,90	1,10	211.284,40	1,11
13	Jasa Perusahaan	140,50	0,00	130,30	0,00	140,50	0,00	152,80	0,00	171,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	386.332,30	2,43	334.344,70	2,33	386.332,30	2,50	446.276,30	2,59	515.566,70	2,71
15	Jasa Pendidikan	292.993,00	1,84	260.902,90	1,82	292.993,00	1,89	330.521,40	1,92	381.473,50	2,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.169,40	0,89	126.307,80	0,88	142.169,40	0,92	161.256,70	0,94	183.762,30	0,97
17	Jasa lainnya	28.601,70	0,18	26.223,10	0,18	28.601,70	0,18	30.224,10	0,18	33.568,80	0,18
ADHB		15.906.757,60	100,00	14.324.518,90	100,00	15.481.098,40	100,00	17.206.439,20	100,00	18.993.962,60	100,00

SUMBER : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2018, BP3D Kabupaten Bintan (data diolah)

Tabel 2.8. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam Pdrb Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 Atas Dasar Harga Konstan (Adhk)

No.	Sektor/Lapangan Usaha	2013	%	2014	%	2015	%	2016*	%	2017**	%
Sektor Primer		2.462.940,60	22,93	2.456.983,90	21,51	2.420.246,80	20,15	2.369.032,20	18,61	2.183.781,40	16,34
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	643.377,70	5,99	689.793,00	6,04	734.450,70	6,11	783.906,40	6,16	822.206,10	6,15
2	Pertambangan dan Penggalian	1.819.562,90	16,94	1.767.190,90	15,47	1.685.796,10	14,03	1.585.125,80	12,45	1.361.575,30	10,19
Sektor Sekunder		5.613.824,20	52,26	6.080.137,30	53,22	6.472.245,70	53,88	6.985.015,00	54,88	7.542.701,90	56,44
3	Industri Pengolahan	4046394,9	37,669	4344459,7	38,028	4590668,1	38,213	4868474,1	38,253	5223056,3	39,081
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14426,4	0,1343	15695,9	0,1374	16294,4	0,1356	18701,7	0,1469	19997,4	0,1496
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6633,1	0,0617	7095,4	0,0621	7575,1	0,0631	7993,1	0,0628	8417,6	0,063
6	Konstruksi	1546369,8	14,396	1712886,3	14,993	1857708,1	15,464	2089846,1	16,421	2291230,6	17,144
Sektor Tersier		2.665.156,40	24,81	2.887.253,40	25,27	3.120.898,40	25,98	3.372.914,00	26,50	3.638.338,50	27,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930.043,00	8,66	1.014.481,90	8,88	1.101.421,00	9,17	1.194.543,10	9,39	1.289.831,60	9,65
8	Transportasi dan Pergudangan	221.806,00	2,06	242.426,80	2,12	265.113,40	2,21	287.510,80	2,26	311.710,60	2,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	503.718,40	4,69	547.914,30	4,80	597.561,80	4,97	650.934,40	5,11	708.299,60	5,30
10	Informasi dan Komunikasi	155.363,50	1,45	166.034,30	1,45	174.620,20	1,45	183.766,30	1,44	194.766,50	1,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	174.219,90	1,62	188.952,00	1,65	204.658,20	1,70	222.181,20	1,75	239.757,80	1,79
12	Real Estate	119.386,60	1,11	127.615,80	1,12	136.574,00	1,14	147.749,90	1,16	158.655,70	1,19
13	Jasa Perusahaan	112,60	0,00	118,60	0,00	123,10	0,00	128,80	0,00	133,60	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	238.509,80	2,22	257.406,00	2,25	277.043,20	2,31	298.550,30	2,35	321.076,40	2,40
15	Jasa Pendidikan	200.254,60	1,86	212.798,10	1,86	226.726,80	1,89	242.284,40	1,90	259.047,30	1,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.732,10	0,94	107.636,60	0,94	114.342,10	0,95	121.813,70	0,96	129.929,50	0,97
17	Jasa lainnya	21.009,90	0,20	21.869,00	0,19	22.714,60	0,19	23.451,10	0,18	25.129,90	0,19
ADHK		10.741.921,20	100,00	11.424.374,60	100,00	12.013.390,90	100,00	12.726.961,20	100,00	13.364.821,80	100,00

SUMBER : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2018, BP3D Kabupaten Bintan (data diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2017 tumbuh 5,01 %, sedikit melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,94%. Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi antara tahun 2017 terhadap 2016, beberapa kategori mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (10,74 %), kategori industri pengolahan (7,28%) dan Jasa Lainnya (7,16 %). PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yaitu masing-masing dari 17,21 triliun dan 12,73 triliun pada tahun 2016 menjadi 18,99 triliun dan 13,36 triliun pada tahun 2017. Perekonomian Kabupaten Bintan didominasi oleh sektor industri pengolahan (40,19 %), kemudian konstruksi (17,60 %). Kedua sektor unggulan tersebut menguasai 57,79 persen perekonomian di Kabupaten Bintan, sedangkan 15 kategori lainnya hanya menguasai 42,21 persen.

Tabel 2.9.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan
Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017

Sektor PDRC	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,21	7,21	6,47	6,3	5,31
Pertambangan dan Penggalian	-2,88	-2,88	-4,27	-5,45	-14,88
Industri Pengolahan	7,37	7,37	5,54	5,86	7,60
Pengadaan Listrik dan Gas	8,8	8,8	3,81	14,77	6,93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	6,97	6,76	5,52	5,31
Konstruksi	10,77	10,77	8,45	12,34	9,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,08	9,08	8,57	9,39	7,05
Transportasi dan Pergudangan	9,3	9,3	9,36	8,45	8,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,77	8,77	9,06	8,93	8,81
Informasi dan Komunikasi	6,87	6,87	5,17	5,24	5,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	8,46	8,3	8,5	7,99

Sektor PDRC	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
Real Estate	6,89	6,89	7,02	7,26	8,30
Jasa Perusahaan	5,32	5,32	3,81	4,64	3,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,92	7,92	7,63	7,76	7,55
Jasa Pendidikan	6,26	6,26	6,55	6,86	6,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,85	6,85	6,23	6,53	6,66
Jasa lainnya	4,09	4,09	3,87	3,24	7,16
PDRB	6,35	6,35	5,16	5,96	5,80

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Bintan Dalam Angka 2018

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

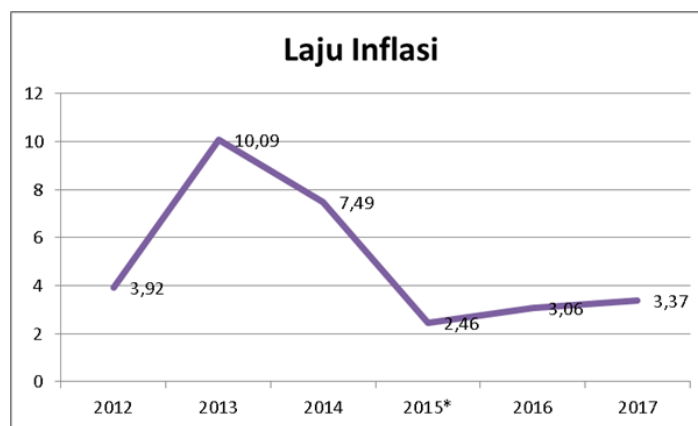
Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 inflasi di Kota Tanjungpinang sempat menembus angka dua digit, yaitu sebesar 10,09 persen. Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2013 merupakan dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sehingga menimbulkan naiknya biaya transportasi. Kita ketahui bahwa Kota Tanjungpinang bukanlah daerah penghasil bahan pangan dan sebahagian besar kebutuhan masyarakat didatangkan dari daerah lainnya. Dengan biaya transportasi yang mengalami kenaikan seiring naiknya harga BBM mengakibatkan harga barang/komoditi yang didatangkan ke Kota Tanjungpinang turut mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2014 inflasi di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dan tercatat sebesar 7,49 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2013, namun tingkat inflasi ini masih cukup tinggi dan sangat menurunkan daya beli masyarakat. Masih cukup tingginya inflasi pada tahun 2014 juga tidak terlepas dari naiknya harga BBM yang pada akhirnya berdampak pada naiknya harga kebutuhan masyarakat. Turunnya harga BBM pada tahun 2015 telah membawa angin segar terhadap perkembangan harga kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat inflasi pada tahun ini yang hanya mencapai 2,46 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2015 ini merupakan inflasi terkecil kedua selama sepuluh tahun terakhir setelah tingkat inflasi pada tahun 2009 yang hanya mencapai 1,43 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang sedikit lebih tinggi dibanding pada tahun 2015, yaitu sebesar 3,06 prsen. Meskipun sedikit lebih tinggi, namun tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2016 ini dapat dikatakan masih cukup terkendali, masih didalam target yang ditetapkan pemerintah (+ 4 persen).

Pada tahun 2017 ini inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang lebih tinggi dari tahun 2016, yaitu sebesar 3,37 persen, namun masih didalam rentang target yang ditetapkan pemerintah. Cukup terkendalinya tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang, terlebih dalam tiga tahun terakhir ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Gambar 2.4.

Grafik Perkembangan Inflasi Kabupaten Bintan/Kota Tanjung Pinang 2012-2017

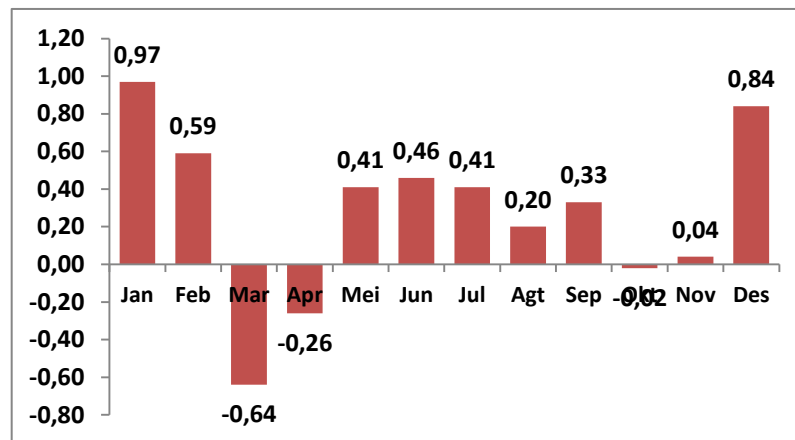


Sumber : -LKPD Bupati Bintan Tahun 2017
-BPS Kota Tanjungpinang, Tahun 2018

Perkembangan Inflasi Kabupaten Bintan, Inflasi di Kabupaten Bintan / Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Dengan indeks 130,26 pada bulan Desember ini, berarti tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang tahun 2017 mencapai sebesar 3,37 persen. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa sepanjang tahun 2017 keadaan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat di Kota Tanjungpinang secara umum mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,37 persen. Perkembangan (kenaikan) harga berbagai komoditas barang dan jasa di Kota Tanjungpinang tahun 2017 jika dibandingkan dengan perkembangan harga tahun 2016 sedikit lebih tinggi. Meskipun tingkat inflasi yang terjadi pada tahun ini sedikit lebih tinggi dibanding tingkat inflasi pada tahun 2016 lalu, namun masih didalam rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan, yaitu +4 persen.

Gambar 2.5.

Inflasi Bulanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2017



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, 2018

Kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa meskipun harga kebutuhan masyarakat di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan, namun kenaikannya masih dapat dikatakan cukup terkendali. Beberapa faktor yang mendukung terkendalinya inflasi di Kota Tanjungpinang pada tahun stabilnya nilai tukar, rendahnya tekanan permintaan masyarakat dan semakin solidnya program-program TPID dalam menjaga kestabilan harga di Kota Tanjungpinang.

Sepanjang tahun 2017 di Kota Tanjungpinang terjadi inflasi sebanyak 9 bulan dan 3 bulan lagi deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,97 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan November sebesar 0,04 persen. Penyebab utama kenaikan indeks harga yang terjadi pada bulan Januari adalah naiknya harga barang dan jasa yang tergabung dalam kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok bahan makanan, serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sedangkan deflasi terbesar terjadi pada bulan Maret 0,64 persen, yang disebabkan turunnya indeks harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

C. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini di Kabupaten Bintan, 2014 - 2017

Tahun	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Sedang	20% Berpengeluaran Tinggi	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>)
2017	21,85	39,20	38,95	0,299
2016	29,84	39,01	31,15	0,323
2015	35,32	38,35	26,32	0,312
2014	18,97	36,21	44,82	0,352

D. Tingkat Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten, Bintan pada tahun 2017 adalah Rp.354.012. Dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2016 yang sebesar 342.812 rupiah. Nilai garis kemiskinan ini meningkat sebesar 3,27 persen. Berdasarkan Tabel dibawah maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan sebesar 9.384 jiwa pada tahun 2017 atau sekitar 6,01 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bintan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2016 yang sebesar 6,43 persen, maka angkanya mengalami penurunan sebesar 0,42 persen. Bila dilihat dari tabel dibawah ini prosentase penduduk miskin 5 tahun terakhir menunjukkan tren menurun sejak tahun 2012.

Tabel 2.10.

Garis Kemiskinan, Persentase, dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan, 2012 – 2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)
2017	354.012	6,01	9,37
2016	341.812	6,43	9,91
2015	313.277	6,07	9,25
2014	301.829	6,09	9,27
2013	298.916	6,23	9,30
2012	290.994	6,29	9,30

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2018

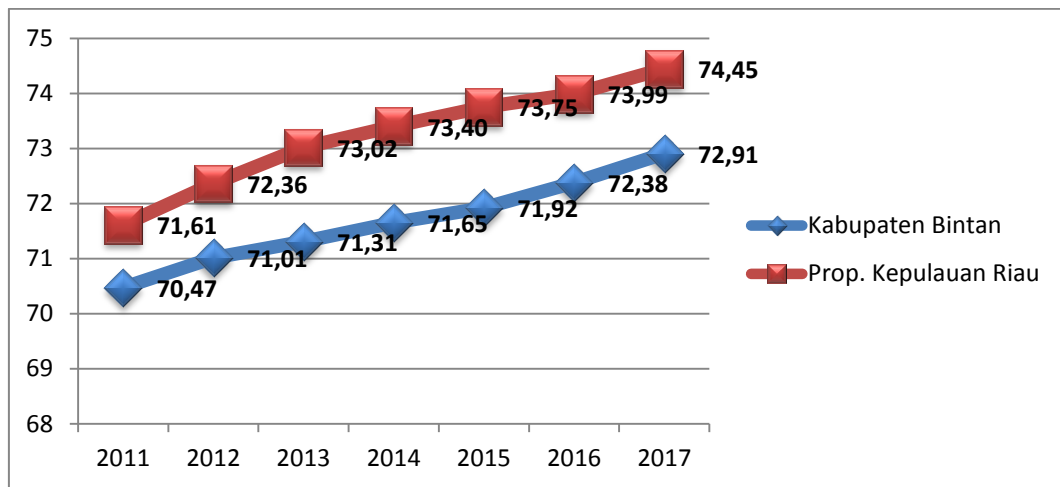
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Selain PDRB, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dimana IPM ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk daerahnya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya Beli (purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

Untuk mengetahui nilai IPM digunakan Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Ditinjau perkomponen penyusunnya, kenaikan nilai IPM metode lama Kabupaten Bintan terutama didukung oleh kenaikan nilai indeks pendidikan dan kesehatan. Khusus untuk indeks pendidikan, dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini salah satunya diduga diakibatkan adanya penduduk Kabupaten Bintan yang meneruskan pendidikannya di luar Kabupaten Bintan, seperti di Kota Tanjungpinang. Kualitas pendidikan yang lebih baik di Kota Tanjungpinang masih menjadi daya tarik bagi beberapa penduduk di Kabupaten Bintan untuk melanjutkan pendidikan di Kota Tanjungpinang. Sehingga peningkatan indeks pendidikan tercatat di Kota Tanjungpinang.

Gambar 2.6.

Pencapaian IPM Kabupaten Bintan Dengan Menggunakan Metode Baru



Sumber: BPS Kab. Bintan 2015, RPJMD Kab. Bintan 2011-2017

Status pembangunan manusia Kabupaten Bintan, secara umum dapat digambarkan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan. Indikator inilah yang saat ini masih dapat menjadi ukuran perkembangan pembangunan manusia, yang menggabungkan kualitas pembangunan manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan daya belinya. Dampak dari pembangunan manusia itu sendiri akan memberikan nilai IPM yang selalu meningkat. Nilai IPM dan peningkatannya antardaerah akan memperlihatkan sejauh mana status pembangunan manusia antardaerah, yang dalam hal ini kabupaten/kota dalam provinsi. Penghitungan angka IPM metode lama dirasakan kurang mencerminkan kondisi pada zaman sekarang ini. Dengan menggunakan metode baru Kabupaten Bintan memiliki IPM sebesar 71,92. Namun, bila dibandingkan Capaian IPM pada kedua metode sama-sama menunjukkan tren IPM yang selalu meningkat. Namun, capaian IPM dengan metode baru menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan. Artinya, perubahan beberapa indikator dan metode agregasi ternyata lebih bisa menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan manusia di daerah.

Terlepas dari perubahan metode, capaian IPM Kabupaten Bintan pada tahun 2017 tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan upaya yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pembangunan manusia.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kabupaten Bintan selalu menduduki peringkat ketiga berada di bawah IPM Provinsi Kepulauan Riau. Dapat dikatakan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau sedikit banyaknya didongkrak oleh pencapaian IPM di Kabupaten Bintan. Bahkan hingga tahun 2012, di Kepulauan Riau masih ada daerah yang IPM-nya masih tergolong rendah ($IPM < 60$), tetapi IPM Provinsi termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari kontribusi daerah lainnya yang capaian IPM-nya tinggi dan bermuatan besar, dan salah satunya Kabupaten Bintan. IPM Kabupaten Bintan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2015) nilainya selalu di atas angka 70, berada sedikit dibawah IPM Provinsi Kepulauan Riau. Capaian ini tentu masih harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang makin berkualitas.

Tabel 2.11.
Pencapaian IPM Kepulauan Riau 2011-2017

Wilayah	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia ()						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Riau	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45
Karimun	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84	70,26
Bintan	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38	72,91
Natuna	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23	71,52
Lingga	58,51	59,32	60,13	60,75	61,28	62,44	63,45
Kepulauan Anambas	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30	67,06
Batam	77,82	78,39	78,65	79,13	79,34	79,79	80,26
Tanjungpinang	74,86	75,91	76,70	77,29	77,57	77,77	78,00

Sumber: BPS Propinsi Kepulauan Riau 2018

Mengingat pembangunan dalam fokus kesejahteraan sosial ini berkorelasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, maka intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Bintan tidak terbatas melalui program-program sosial, tetapi juga perlu didukung peningkatan sarana dan prasarana terkait.

Tabel 2.12.
IPM Kabupaten Bintan dan Pendukungnya (2010-2017)

Pendukung	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AHH(angka harapan hidup - tahun)	69,42	69,62	69,76	69,86	69,91	69,92	70,02	70,12
HLS (Harapan Lama Sekolah - tahun)	11,08	11,32	11,55	11,61	11,80	11,98	12,27	12,60
RLS (Rata-rata Lama Sekolah - tahun)	8,08	8,13	8,18	8,23	8,30	8,30	8,32	8,34
Pengeluaran perkapita di sesuaikan (ribu rupiah)	12.836,81	13.077,16	13.270,27	13.441,04	13.477,45	13.528,81	13.667,00	13.828,00
IPM	69,87	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38	72,91

Sumber: BPS Kabupaten Bintan 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bintan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Slogan *think globally, act locally* haruslah menjadi kebiasaan sehari-hari dan tidak hanya slogan belaka.

Sementara dewasa ini para pemuda cenderung melupakan nilai-nilai budaya melayu yang menjadi jati diri warga pribumi khususnya warga Kabupaten Bintan. Nilai-nilai kemelayuan ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya maupun kesenian melayu.

Namun upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bintan seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian merupakan salah satu nilai yang dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu juga bidang olahraga dinilai perlu mendapat perhatian khusus juga. Kebiasaan berolahraga akan menghasilkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, dimana selain menyehatkan tubuh kegiatan berolahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Namun kenyataannya, anak muda masa kini cenderung tidak memprioritaskan olahraga, dan cenderung disibukkan dengan perangkat *gadget* bahkan sejak bangun tidur hingga beranjak tidur.

Hal ini dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang dimana generasi muda yang akan menjadi ujung tombak pembangunan akan menjadi generasi yang lemah. Oleh karenanya diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk memasyarakatkan kembali kebiasaan olahraga.

A. Kebudayaan

1) Jumlah Grup Kesenian

Jumlah grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Berdasarkan data dalam dokumen Evaluasi RPJMD 2016, jumlah grup kesenian yang dibina di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan jumlah grup kesenian dari yang bermula hanya sebanyak 5 grup di tahun 2011 menjadi 35 grup di tahun 2017, hal ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan minat masyarakat terhadap kesenian secara umum tentunya dapat menjadi modal untuk mewujudkan pembangunan di aspek kebudayaan.

2) Jumlah Gedung Kesenian

Jumlah Gedung Kesenian juga merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan kesenian. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bintan meningkat dari hanya 1 gedung saja pada tahun 2011 menjadi 5 gedung pada tahun 2017. Bertambahnya jumlah gedung ini dapat diartikan sebagai adanya usaha menyediakan sarana untuk mengekspresikan kesenian yang dikembangkan di Kabupaten Bintan.

B. Pemuda dan Olahraga**1) Jumlah Klub Olahraga**

Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga. Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bintan meningkat dari 369 klub olahraga menjadi 378 klub olahraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat warga terhadap kegiatan olahraga.

2) Jumlah Gedung Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bintan. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 14 gedung sarana olahraga di Kabupaten Bintan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari dua fokus layanan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib meliputi aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang, dan perhubungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya secara memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah dibidang ini meliputi :

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya untuk pembangunan daerah. Pelayanan pendidikan pemerintah daerah dinilai melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2013-2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung perbandingan terhadap jumlah siswa, baik pada level SD, SLTP, maupun SMA/ Sederajat terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD/ Sederajat, digunakan rentang usia 7 – 12 tahun. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP/ Sederajat, digunakan rentang usia 13 – 15 tahun. Adapun untuk tingkat pendidikan SMA/ Sederajat digunakan rentang usia 16 – 18 tahun.

Secara garis besar APS dikelompokkan ke dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukan rasio antara jumlah siswa dalam rentang usia pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan rasio antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan tertentu. Sehingga berbeda dengan APM, dalam penghitungan APK, jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang usia sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100 %.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Tabel 2.13.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2017

USIA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017**
SD 7-12	99,05	99,75	107,65	107,15	105,01
SMP 13-15	94,74	99,14	82,14	98,24	95,72
SMA 16-18	70,49	83,82	104,18	-	-

Sumber : BPS/Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2018

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Kondisi Kabupaten Bintan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dalam hal angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD 7-12 TAHUN	105,47	107,16	107,52	112,17	105,01	119,71
SMP 13-15 TAHUN	90,82	95,31	95,7	112,17	95,72	114,61
SMA 16-18 TAHUN	82,19	86,65	86,97	-	-	-

Sumber : BPS/Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2018

Tabel 2.15.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD 7-12 TAHUN	97,91	98,7	98,98	96,26	97,27	107,31
SMP 13-15 TAHUN	85,59	87,17	87,96	84,86	87,61	80,91
SMA 16-18 TAHUN	67,38	76,1	76,53	-	-	-

Sumber : BPS/Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2018

Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan estimasi BP3D Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2017 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 97,27% menurun menjadi 107,31% pada tahun 2018. Artinya pada tahun 2017 ada sebanyak 107,31% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2017 yaitu 105,01 menjadi 119,71 pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2017 adalah 95,72 sedangkan pada tahun 2018 yaitu 114,61. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2017 yaitu 87,61 sedangkan 2018 yaitu 80,91.

3) Angka Melek Huruf (AMH)

AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2018 untuk angka melek huruf ini tercatat sebesar **99,5%**, ini menunjukkan masih ada sekitar angka **0,5%** penduduk Kabupaten Bintan **yang masih buta huruf**. Capaian kinerja sudah cukup baik dibandingkan dengan capaian tahun 2017 tercatat sebesar 99,5%. Namun capaian ini masih di bawah target RPJMD yang sudah ditetapkan, ini berarti Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan harus bekerja lebih keras lagi untuk menuntaskan angka buta huruf ini.

Tabel 2.16.
Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014-2018

No	Tahun	Penduduk dewasa (usia 10+) yang melek huruf (%)
1.	2014	98,50
2.	2015	99,07
3.	2016	97,27
4.	2017	99,50*
5.	2018	99,5

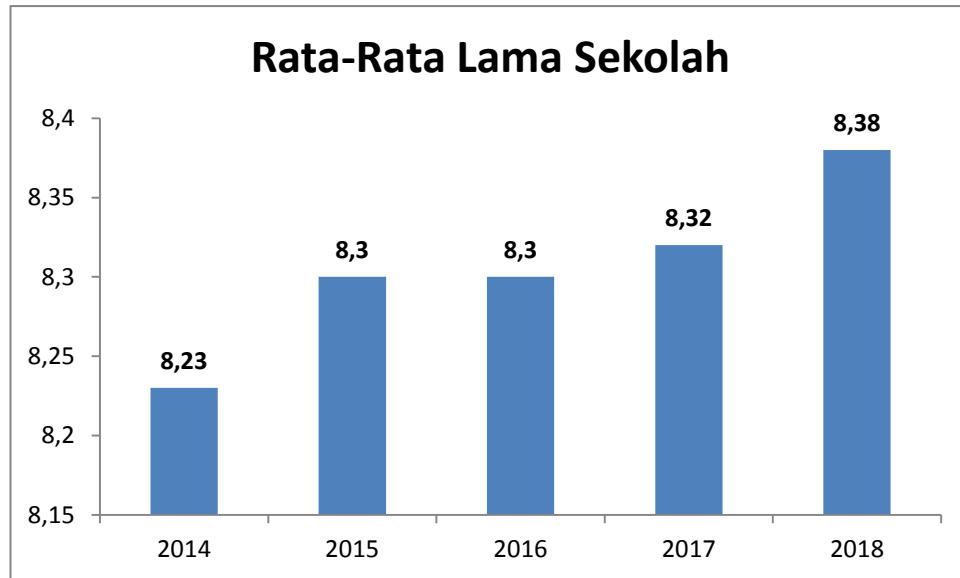
Sumber: - BPS Kabupaten Bintan, 2018
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan 2018

Secara umum peningkatan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode 2014-2018 di Kabupaten Bintan cukup baik.

4) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan semakin baik. Menurut data hasil olahan BP3D Kabupaten Bintan pada tahun 2017 harapan lama sekolah 12,27 tahun diestimasi meningkat menjadi 12,45 tahun pada tahun 2017. Sedangkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yaitu 8,32 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,38 hal ini menunjukkan penurunan angka *drop out* dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan.

Gambar 2.7.
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018

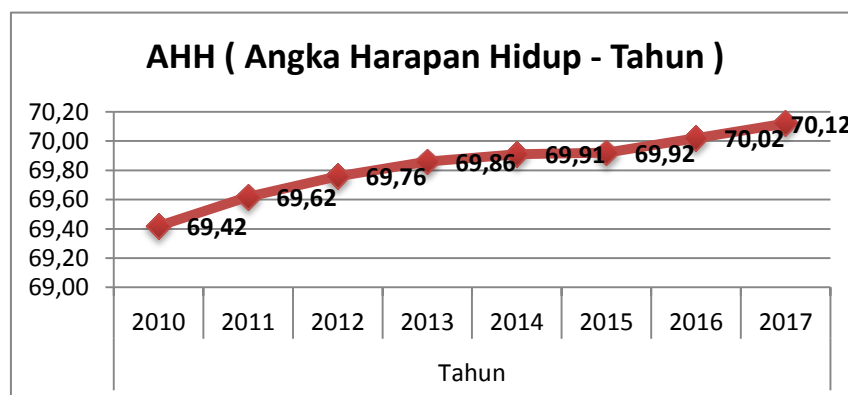


Sumber: Data hasil olahan BP3D Kabupaten Bintan, 2018

2.3.1.2 Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat nilai Indeks Kesehatan dan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk. Meninjau perkembangan lima tahun terakhir, nilai indeks kesehatan dan AHH di Kabupaten Bintan cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010, Adapun untuk nilai AHH, tahun 2011 AHH Kabupaten Bintan bernilai 69,42 tahun, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,12 tahun.

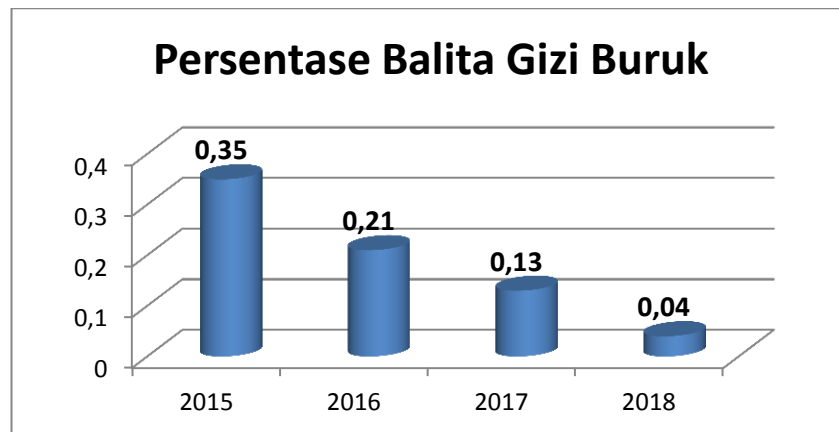
Gambar 2.8.
AHH (Angka Harapan Hidup-Tahun) dari Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Kabupaten Bintan 2018

Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan. Peningkatan kualitas tersebut sejalan dengan upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas SDM Kabupaten Bintan. Beberapa indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan antara lain:

1) Persentase Balita Gizi Buruk



Sumber : Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat dan UKBM Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

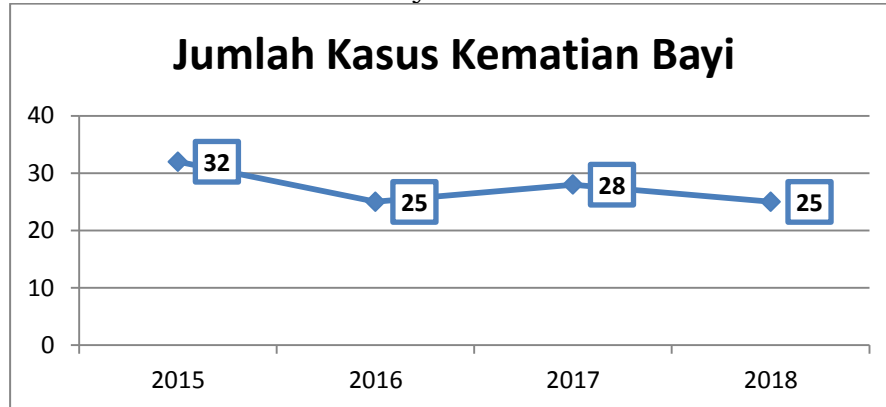
Pengertian balita gizi buruk adalah balita sangat kurus dengan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/TB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah severely wasted (sangat kurus) dengan ambang batas antropometri <-3 SD.

Persentase kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2018 adalah 0,04%. Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk pada tahun 2016, serta bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional (Riskesdas, 2013) dimana angka gizi buruk provinsi Kepri 6% (PSG, 2016) dan angka gizi buruk nasional 5,3% (Riskesdas, 2013) sedangkan target nasional adalah $<1\%$.

Seluruh kasus balita gizi buruk yang ditemukan setiap tahunnya dilaksanakan perawatan (100%) sesuai dengan kasus yang ditemukan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Pemantauan dan perawatan kasus gizi buruk yang ditemukan tahun 2017 sebanyak 15 kasus telah sesuai dengan tatalaksana anak gizi buruk oleh Tim Asuhan Gizi Puskesmas khususnya puskesmas perawatan yang telah dilatih.

Balita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan pemulihan serta multi vitamin serta pembinaan gizi anak kepada keluarga balita.

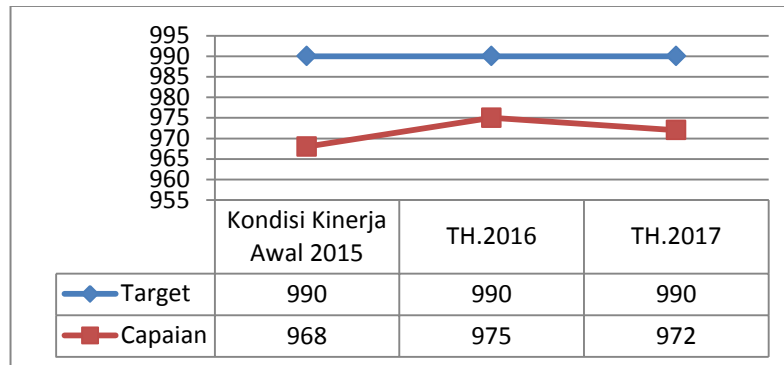
2) Jumlah Kasus Kematian Bayi



Sumber : Seksi Kesga, Usila dan UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bintan pada Tahun 2018 masih dibawah target, tetapi dari data diatas terlihat terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya sebesar 2 (dua) kasus yang disebabkan oleh pada tahun 2017 banyak terjadi kasus **Gamelli**. Menu kasus juga mengalami masalah dimana terjadi peralihan penyebab kematian terbesar pada bayi yang sebelumnya adalah Penyebab Tidak Langsung menjadi Penyebab Langsung (BBLR dan Asfiksia). Hal diatas berhubungan dengan SDM terutama Bidan Desa yang masih sangat memerlukan peningkatan SKILL/Kompetensi dalam hal penanganan kasus.

3) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

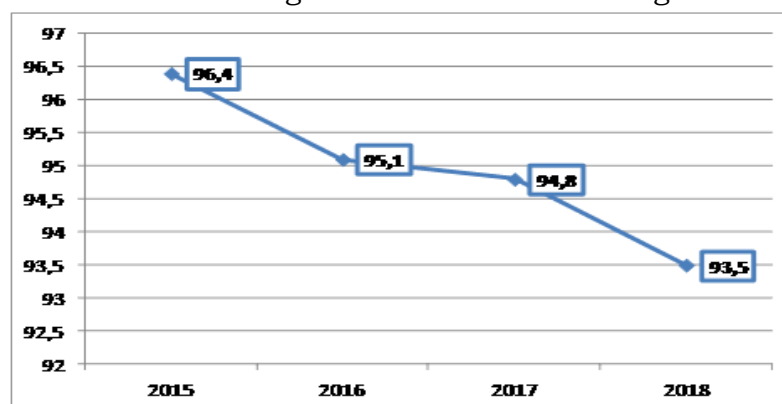


Sumber : Seksi Kesga, Usila dan UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Angka kelangsungan Hidup bayi di Kabupaten Bintan tahun 2017 yaitu 972, bila dibanding tahun sebelumnya yaitu 975 terjadi sedikit penurunan. Penurunan angka kelangsungan hidup bayi sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), makin kecil persentase AKB semakin tinggi angka kelangsungan hidup bayi, dan begitu pula sebaliknya dengan meningkatnya angka kematian bayi pada Tahun 2017 maka Angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2017 menjadi menurun.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi antara lain dengan meningkatkan kompetensi Bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan mulai dari masa kehamilan sampai masa persalinan melalui pelatihan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan program lain yang mendukung.

4) Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)



Sumber : Seksi Kesga, Usila dan UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

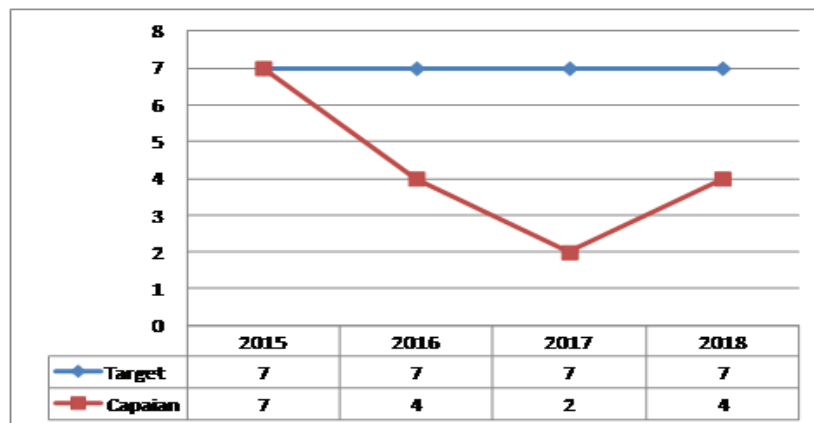
Pemerintah Kabupaten Bintan

Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan (Linakes) di Kabupaten Bintan tahun 2018 sebesar **93,5%**. Persentase Linakes tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,3% dari tahun 2017. Terjadi penurunan capaian Persalinan Nakes dari tahun sebelumnya disebabkan oleh masih adanya Persalinan ditolong oleh Dukun dan masih ada Bumil yang belum bersalin

Upaya untuk meningkatkan cakupan Pn terus dilakukan dengan memberikan hasil evaluasi dan feedback melalui pertemuan review program serta bimbingan teknis dan monitoring ke Puskesmas, khususnya pada daerah yang memiliki capaian rendah agar dapat meningkatkan cakupan.

Dalam upaya peningkatan cakupan Pn tersebut seksi KIA melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu : (1) Peningkatan cakupan Pn dan Kf melalui Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran, (2) Penguatan Manajemen dan Jejaring Rujukan di tingkat Kabupaten melalui Manual Rujukan yang ditandatangani oleh Bupati Bintan, (3) Pembentukan Tim AMP tingkat Kabupaten Bintan, (4) Peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan Pn dan Kf di Fasilitas Kesehatan, (5) Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, (6) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi bagi bidan koordinator di Kecamatan dan Desa.

5) Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan

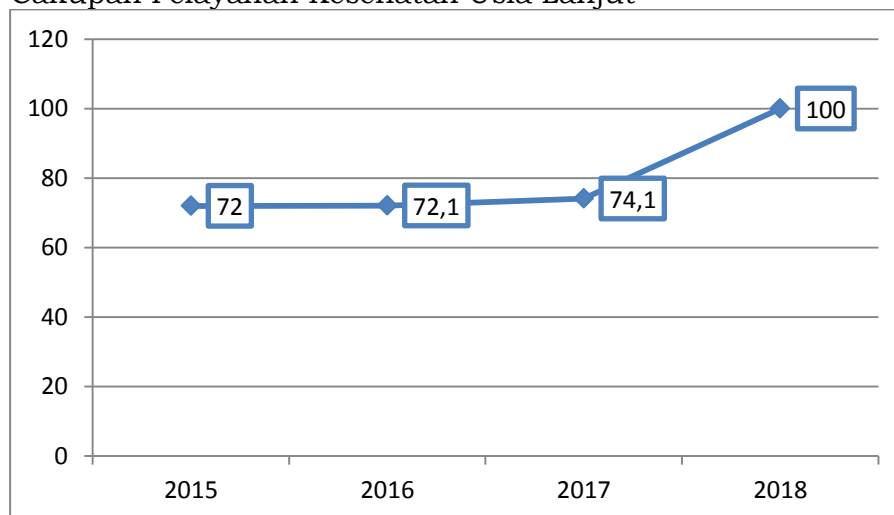


Sumber : Seksi Kesga, Usila dan UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Jumlah Kasus Kematian ibu tahun 2018 berjumlah 4 **kasus**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus. Angka tersebut lebih rendah dari target RPJMD 2017 yaitu 7 Kasus atau < 200 per 100.000 KH dan target MDG's 2017 yaitu 102 per 100.000 KH.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut adalah : (a) Melakukan audit maternal melalui pengkajian dan menganalisa seluruh kasus kematian maternal oleh Tim AMP bekerjasama dengan dokter Spesialis Obstetri Gyneocology, (b) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam P4K, (c) Meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan melalui pendidikan dan pelatihan serta seminar, dan (d) Pemberian Makanan Tambahan ibu hamil berupa biscuit dan susu Ibu hamil.

6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut



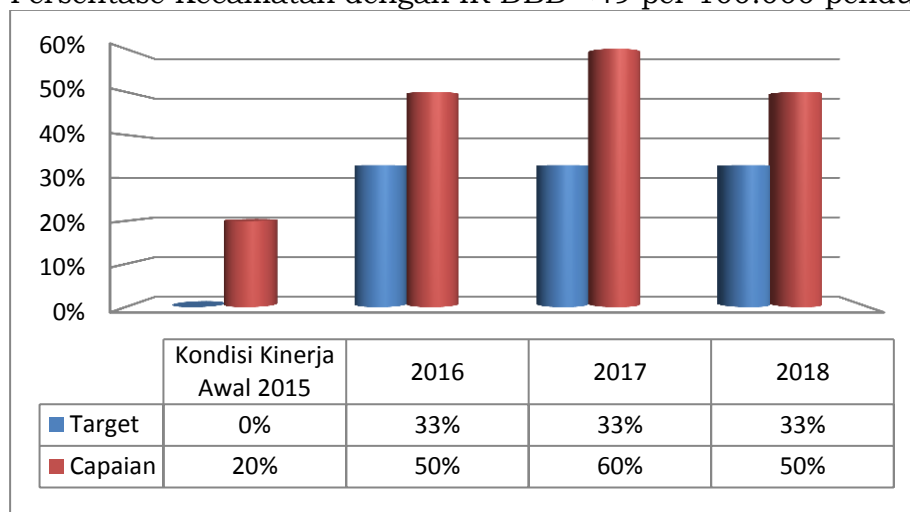
Sumber : Seksi Kesga, Usila dan UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Tingginya usia harapan hidup menunjukkan semakin baiknya kualitas kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Sejalan dengan tingginya usia harapan hidup juga menyebabkan semakin tinggi pula jumlah populasi penduduk usia lanjut (usila).

Maka keberadaan para lanjut usia diupayakan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun di posyandu/kelompok usia lanjut dalam meningkatkan kualitas hidup.

Cakupan persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan usia lanjut mencapai 100%. Dan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Kabupaten Bintan pada tahun 2018 meningkat menjadi 100%, meningkat jika dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2017 yang sebesar 74,1% telah mencapai target RPJMD 2016-2021 sebesar 74%. Oleh karena itu pelayanan kesehatan bagi warga usia lanjut masih perlu dipertahankan dengan meningkatkan peran aktif posyandu lansia secara optimal dan adanya koordinasi dan peran masyarakat serta lintas sektor terkait dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan terhadap lansia.

7) Persentase Kecamatan dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk.

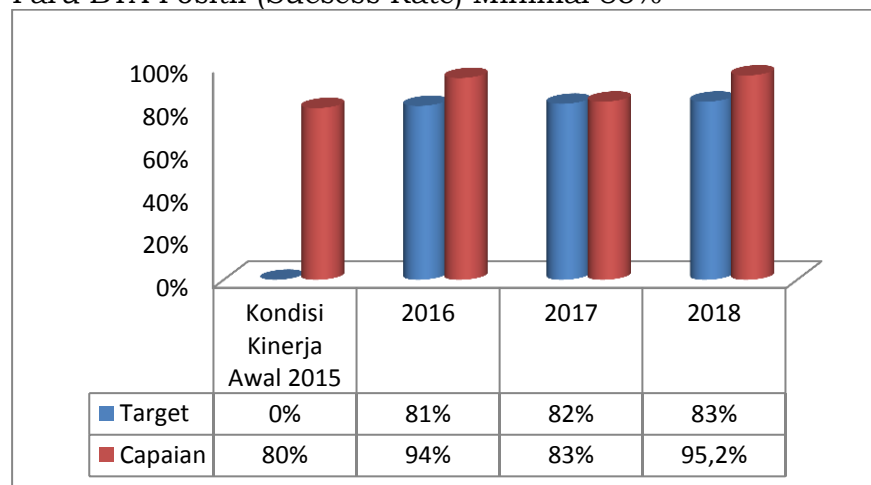


Sumber : Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas, persentase Kecamatan di Kabupaten Bintan yang memiliki IR (Incident Rate) DBD < 49 per 100.000 penduduk yaitu sebesar 50% atau 5 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bintan.

Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas. Kemudian dilakukan pengasapan (Fogging Focus) dan abatesasi massal dengan radius ± 100 meter dari tempat tinggal kasus. Selain itu lebih mengoptimalkan kegiatan PSN dengan meningkatkan kinerja Kader Pemantau Jentik Berkala (PJB) yang bertugas untuk memantau secara berkala tempat-tempat penampungan air bersih yang memungkinkan sebagai tempat perindukan nyamuk *Aedes Aegypti* di setiap rumah di masing-masing wilayah kerja, serta dengan melakukan Gerakan 3 M Plus secara serentak serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

8) Persentase Kecamatan Dengan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positif (Sucess Rate) Minimal 85%

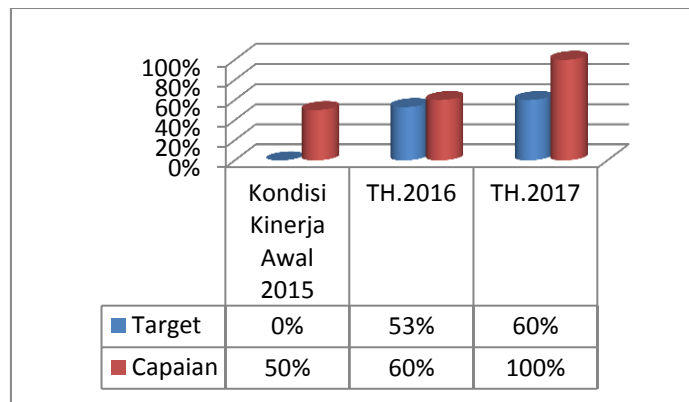


Sumber : Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Keberhasilan kesembuhan pengobatan TB di Kabupaten Bintan Tahun 2018 sebesar 95,2%. Jumlah keberhasilan kesembuhan ini meningkat jika di banding dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 83%.

Pemerintah Kabupaten Bintan

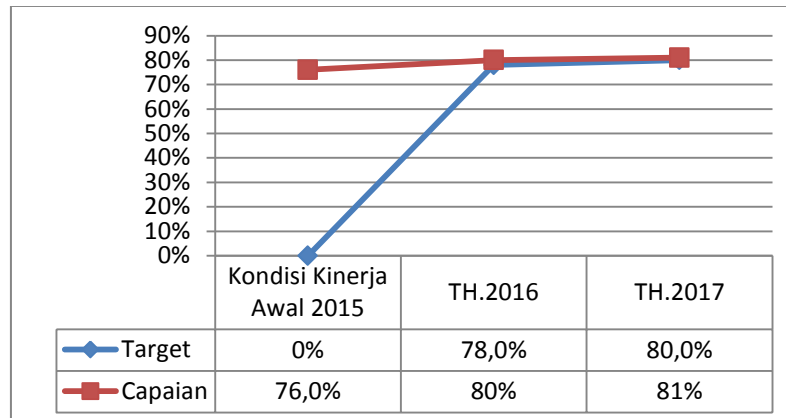
- 9) Persentase Kecamatan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS



Sumber : Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas, persentase Kecamatan di Kabupaten Bintan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS yaitu sebesar 100% atau seluruh Puskesmas di Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan telah melaksanakan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS, capaian kinerja tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2016 yang lalu yaitu 60%. Selama tahun 2017 jumlah penemuan kasus pneumonia balita sebanyak 37 orang, angka ini masih jauh dibawah target kabupaten, meskipun target sudah diturunkan oleh kementerian Kesehatan menjadi 3,98 % dari total jumlah balita yang sebelumnya 10% dari jumlah balita. Masih ada beberapa puskesmas yang belum menyumbangkan angka kasus pneumonia balita, hanya sebagian puskesmas seperti Puskesmas Tanjung Uban ada 8 kasus, Puskesmas Teluk Bintan 9 kasus, Puskesmas Kawal 13 kasus dan Puskesmas Sri Bintan 7 kasus. Selama tahun 2017 tidak ada laporan kematian balita yang disebabkan oleh pneumonia. Dari 15 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan semuanya telah melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS karena pada tahun 2017 semua pengelola program yang ada di puskesmas sudah dilatih MTBS.

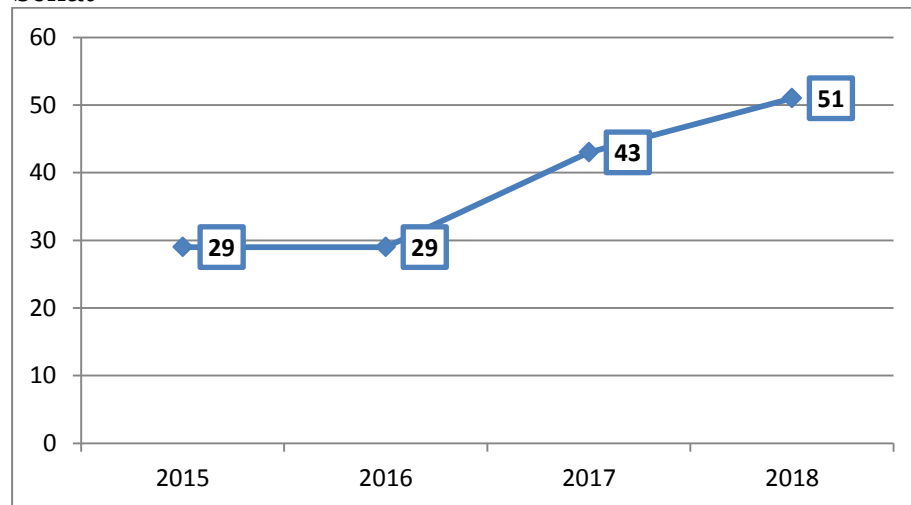
10) Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS



Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Persentase penduduk yang melaksanakan Stop BABS/ menggunakan jamban sehat di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan dari tahun 2016 cakupan pengguna jamban sehat sebesar 113.182 jiwa (80%) dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 119.285 jiwa atau 81%, sedangkan 26.004 jiwa belum menggunakan jamban sehat, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat Bintan tinggal di daerah pesisir pantai ataupun di perkebunan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat semakin tinggi, hal ini sejalan dengan dicanangkannya Program STBM di Kabupaten Bintan melalui Instruksi Bupati Bintan Nomor 2 tahun 2011 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), untuk pelaksanaannya masih memprioritaskan pada Pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan dan telah dilaksanakannya kegiatan pemucuan terhadap kelompok masyarakat/ komunitas oleh petugas dari Dinas Kesehatan beserta petugas sanitasi puskesmas di masing-masing wilayah kerjanya untuk merubah perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat, serta ditunjang dengan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan peningkatan kualitas jamban bagi masyarakat yang telah berubah perilaku dan bersedia membangun jamban sederhana untuk ditingkatkan menjadi jamban sehat. Sampai dengan tahun 2017 secara kumulatif telah terbangun 4.362 unit jamban hasil swadaya masyarakat.

11) Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tataan Kawasan Sehat

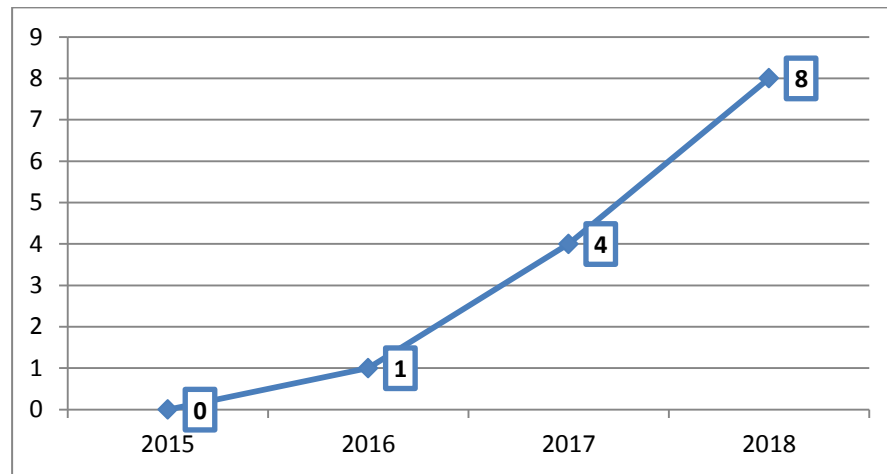


Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pencapaian target Jumlah Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada tahun 2018 telah tercapai, Desa/ Kelurahan di Kab. Bintan yang telah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak **51 Desa/ Kelurahan**.

Kawasan sehat merupakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah, pada tahun 2016 di Kabupaten Bintan telah melaksanakan 4 tatanan dalam mendukung kawasan sehat yaitu Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum dan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, Industri dan perkantoran sehat, serta Tempat Pariwisata sehat, yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten sehat di 8 (delapan) desa/ Kelurahan di 9 wilayah Kecamatan dan mendapatkan penghargaan Swastisaba pada tingkat Wiwerda oleh Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.

12) Jumlah Kecamatan Yang Memiliki 1 (Satu) Puskesmas Yang Tersertifikasi Akreditasi

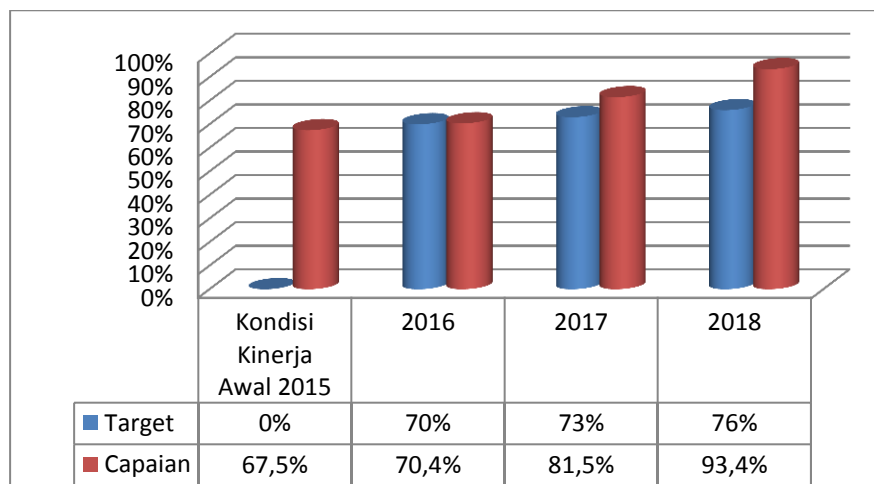


Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, dimana 8 **kecamatan** yang memiliki puskesmas terakreditasi. Pelaksanaan survey akreditasi di Puskesmas pada tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2018, oleh Komite standarisasi dan akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI berlangsung lancar. Direncanakan pada tahun 2019 akan dilaksanakan kembali survei atau penilaian akreditasi Puskesmas di 2 Puskesmas di Kabupaten Bintan.

13) Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Pencapaian indikator kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas tahun 2018 adalah sebesar 93,4% dan telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017 (sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021) yaitu 70%.



Sumber : Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2018

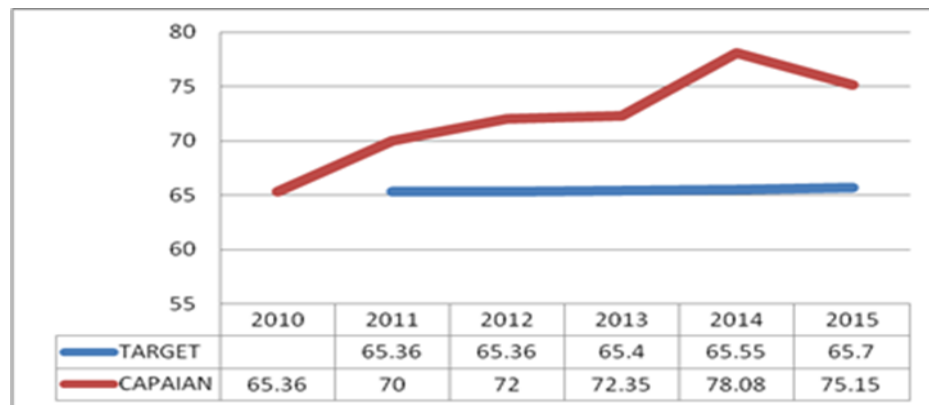
14) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Kabupaten Bintan per 100.000 penduduk tahun 2015 sebesar 75.15, nilai rasio tersebut telah melampaui target tahun 2015 yaitu 65.7, jika dibandingkan dengan angka rasio tahun 2014 terjadi penurunan angka rasio yaitu 78.08 persen. Menurunnya angka rasio tersebut disebabkan penambahan 1 (satu) UPTD Puskesmas di tahun 2015 yaitu UPTD Puskesmas Numbing. Jumlah keseluruhan fasilitas pelayanan primer (Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes/Poskesdes) sebanyak 115 unit dengan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan dari 151.123 jiwa tahun 2014 menjadi 153.020 jiwa di tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Bintan

Gambar 2.9.

Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 - 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2010

15) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk tahun 2015 sebesar 1.31, nilai tersebut dibawah target rasio tahun 2015 yaitu sebesar 1.41. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bintan tahun 201 tetap sama dengan jumlah di tahun 2014 yaitu 2 (dua) Rumah Sakit dengan jumlah penduduk 153.020 jiwa (BPS, 2015). Angka rasio tersebut merupakan perbandingan dari jumlah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk di kali 100.000.

Gambar 2.10.

Grafik Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2016

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Ketersediaan infratraktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum selama periode 2013-2017. (diupdate dgn data terbaru)

1) Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk

Capaian Kinerja pada indikator kinerja Rasio tempat Pemakaman Umum per 1000 penduduk di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 kemudian stagnan pada tahun 2018. Capaian Kinerja pada Tahun 2016 tercatat sebesar 1,15 sedangkan Capaian Kinerja pada Tahun 2017 sebesar 1,17 kemudian tahun 2018 sebesar 1,17. Dari hasil capaian kinerja dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Rasio tempat Pemakaman Umum per 1000 penduduk dari tahun ke tahunnya.

Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 (tujuh) Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 952.957,3 m². Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Melihat hal tersebut, maka masih dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.17.

Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Indeks
1	2018	1,17
2	2017	1,17
3	2016	1,15
4	2015	1,15
5	2014	1,15

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bintan Kab. Bintan, Tahun 2018

2) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 Penduduk

Rasio, merupakan indikator ketersediaan volume tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Indikator tersebut didapatkan dari rumus volume tempat pembuangan sampah dibagi jumlah penduduk dikali 1.000, sehingga indikator tersebut dapat menunjukkan ketersediaan tempat pembuangan sampah per 1.000 penduduk.

Capaian Kinerja pada indikator ini pada tahun 2018 sebesar **0,54**. Dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 0,45. Dari hasil capaian kinerja dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan Penduduk Kabupaten Bintan dari tahun ke tahunnya. Kabupaten Bintan memiliki luas areal daratan 1.319,51 km² dengan sepuluh kecamatan. Persampahan menjadi salah satu masalah utama dikarenakan belum adanya suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, antara lain : TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 66 unit (35 unit berada di Kijang Kec. Bintan Timur, 5 unit berada di Kawal Kec. Gunung Kijang, 12 unit berada di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, 2 unit berada di Kec. Teluk Bintan, 2 unit berada di Kec. Teluk Sebong, dan 3 unit berada di Kec. Seri Kuala Lobam, 3 unit di Kel. Sei. Lekop dan 4 unit di Kelurahan Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur). Truk pengangkut sampah (terdiri atas Dump truck sampah sejumlah 20 unit, Motor kaisar sampah sejumlah 12 unit, sampan sampah sejumlah 1 unit), Gerobak sampah, dan sarana pendukung lain untuk pengelolaan sampah.

Tabel 2.18.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan
Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Indeks
1	2018	0,54
2	2017	0,45
3	2015	0,37

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bintan Kab. Bintan, Tahun 2018

3) Persentase jalan baik

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukkan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik (>40Km/Jam) pada tahun 2010 yaitu sepanjang 215,5 Km dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sepanjang 230 Km. Pada tahun 2012 panjang jalan mencapai 232,071 Km, demikian pula pada tahun 2013 meningkat menjadi 230 Km. Pada tahun 2014 panjang jalan mencapai sepanjang 265,071 Km. Dan pada tahun 2015 telah mencapai 282,771 Km.

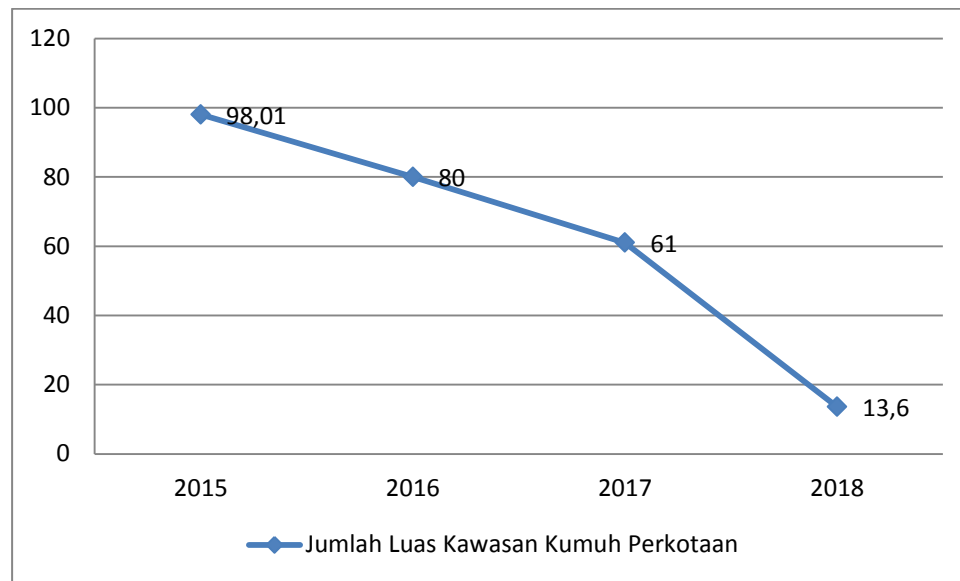
Untuk Tahun 2016 indikator ini digantikan dengan **Tingkat Kemantapan Jalan (mantap marginal)**. Pada tahun 2016 tercatat sepanjang 89,9% dan Tahun 2017 tercatat masih sama yaitu sepanjang 89,9 % kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sepanjang 47,94%.

2.3.1.4 Perumahan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan pada tahun 2018 sebesar 43% sedangkan pada perdesaan sebesar 33%. Kondisi ini telah melampaui target RPJMD tahun 2018. Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah pada tahun 2018 sebesar 797 rumah dan perkotaan sebesar 110 rumah.

Kawasan kumuh di Kabupaten Bintan mengalami penurunan dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 kawasan kumuh menjadi 13,6 ha.

Gambar 2.11.
Luas kumuh Tahun 2015 - 2018



2.3.1.5 Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 6.600 m², ruang terbuka hijau juga berada difasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Tabel 2.19.
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB di
Kabupaten Bintan Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Capaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	186,126	191,351	191,351	218.000	218.000
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan	10 : 90	10 : 90	10 : 90	60 : 40	30 : 70
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan	8 : 92	8 : 92	8 : 92		

Sumber: LKPJ AMJ Bupati Bintan Tahun 2010-2015

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2017 adalah:

- a) Taman Kota Sakera (Kp. Bugis) Kec. Bintan Utara : 20.200 M2
- b) Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 M2
- c) Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur : 74.000 M2
- d) Pulau-pulau jalan di Kabupaten Bintan : 21.890 M2
- e) Taman Lain-lain : 71.910 M2

Sehingga total luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 218.000 M2. Dengan demikian persentase luas RTH yang dikelola terhadap luas yang ditargetkan di renstra SKPD tahun 2017 (218.000 M2) yaitu sebesar 133,89 persen. Tidak ada peningkatan dari luas RTH di tahun 2017.

2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan memasuki periode ketiga RPJPD. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD)

2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman operasional pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Bintan dalam dua tahun terakhir (2016-2018) juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD.

2.3.1.7 Perhubungan

1) Jumlah Arus Penumpang Pelabuhan dan Terminal

Jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat setiap tahun terus meningkat di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2017 telah mencapai 972 orang sedangkan jumlah penumpang yang keluar terminal angkutan darat telah mencapai target yaitu sebanyak 3.648 orang. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan laut yang masuk pelabuhan sebanyak 602.836 orang dan jumlah penumpang yang keluar pelabuhan sebanyak 616.306 orang. Jumlah penumpang yang masuk maupun keluar dari Pelabuhan atau Terminal Angkutan Darat fluktuatif sejak tahun 2013. Berikut ini perkembangan jumlah penumpang selama tahun 2013 sampai 2017.

2) Jumlah Uji KIR angkutan Umum

Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji kir angkutan umum) pada tahun 2017 sudah mencapai target yaitu 1.987 unit. Walaupun mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Dengan Kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 100% sejak tahun 2013. Berikut ini jumlah pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.20.
Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bintan
Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum)	1.276 Unit	2.067 Unit	1.952 Unit	2.098 Unit	1.987 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Bintan

3) Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis

Jumlah pelabuhan penumpang sampai dengan tahun 2017 berjumlah 18 unit, terminal bis 1 unit, sedangkan bandar udara dalam pelaksanaan yaitu Bandara Busung dan Bandara Tambelan sampai dengan saat ini dalam proses pembangunan. Target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2017 telah mencapai mencapai 19 unit.

4) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%. Kepemilikan KIR Angkutan Umum pada tahun 2013 tercatat hanya mencapai 74,85%.

2.3.1.8 Lingkungan Hidup

1) Penanganan Sampah

Rencana pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Bintan diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk membuat bak-bak sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut untuk melayani sampah-sampah dari rumah tangga, kawasan komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat pemerintahan. Sedangkan sistem pengolahan persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara komunal setempat, melalui cara pengomposan maupun melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dengan menggunakan sistem Bank Sampah.

Dengan sistem pengelolaan persampahan seperti ini diharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Beberapa program yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu:

- a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bintan. Pendataan Bank Sampah yang telah dikembangkan oleh instansi terkait.
- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara.

Pada tahun 2018 **Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk** tercatat sebesar 0,54 dan pada tahun 2017 sebesar 0,45.

2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Strategi penanganan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Bintan telah dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di kecamatan dan perdesaan sehingga telah meningkatkan Persentase penduduk berakses air minum dari tahun

2012 tercatat 37,91% meningkat menjadi 64,00% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 tercatat 76,00%.

Ketersediaan Air Minum untuk penduduk Kabupaten Bintan semakin meluas sehingga angka mengalami peningkatan.

Tabel 2.21.

**Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Bintan
Tahun 2012-2017**

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Penduduk Berakses Air	37,91%	98,67	93,74	74,18	64,00	76,00

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan, tahun 2018

3) **Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL**

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sejak tahun 2013 telah mencapai 100%. Pengawasan yang dilakukan atas 62 perusahaan dengan kategori pengawasan pada perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang telah menerapkan AMDAL Tercatat sampai dengan tahun 2017 dari 34 kasus pencemaran lingkungan yang ada baik kasus yang dilaporkan/ pengaduan masyarakat maupun laporan pengaduan oleh beberapa perusahaan akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sudah dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti seluruhnya mencapai 90%. Sedangkan tahun sebelumnya mencapai 100%. Sehingga jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditetapkan.

2.3.1.9 Pertanahan

Luas Lahan milik Pemerintah daerah hingga Tahun 2018 adalah lebih kurang 441,5 ha. Dengan presentase lahan yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat mencapai 62,5%. Sertifikasi aset lahan pemda dilaksanakan melalui Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Namun sertifikasi aset lahan Pemda tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rencana sertifikasi lahan yang diajukan sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan sehingga BPN dan Kanwil Kehutanan menundanya. Keseluruhan lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal.

Untuk permasalahan resettlement Busung dan Pengudang masih dalam proses tahap pendataan lahan dan permintaan perubahan lokasi lahan kepada perusahaan. Penyelesaian sengketa tanah untuk RSUD dan LAM milik PT. ANTAM telah diselesaikan dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai lahan. Sehingga pada tahun 2018 penyelesaian sengketa tanah mencapai 62,5%. Sementara itu untuk kegiatan pengadaan lahan untuk lanjutan pembangunan Bandar Udara Kecamatan Tambelan hanya dapat dilaksanakan hanya sampai pembuatan dokumen perencanaan dikarenakan efisiensi keuangan daerah.

2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah
Data pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah menikah sebanyak 64.572 Jiwa, sementara data yang penduduk ber KTP sebanyak 65.014 Jiwa, sehingga didapat Rasio penduduk ber KTP el per 1000 penduduk telah menikah sebesar 757 Orang. Hal ini mengalami kenaikan dikarenakan rasio penduduk menikah cenderung memiliki KTP. Untuk tahun 2017 digunakan indikator **Persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el** yang tercatat telah melampaui target 100%, dan pada tahun 2016 tercatat 97% .
- 2) Kepemilikan KTP
Tahun 2017, persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el adalah 100%. Dengan kata lain seluruh penduduk wajib KTP-el sudah memiliki KTP-el.

Tabel 2.22.
Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Bintan
Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kepemilikan KTP	92,42%	80,10%	93%	97%	100%	96,45%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bintan, 2018

3) Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100 Bayi Lahir

Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir pada tahun 2018 mencapai 85 persen. Pada periode tahun 2017 rasio bayi yang telah memiliki akte kelahiran per 100 bayi seluruhnya tercatat sebanyak 97 persen. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2017.

4) Rasio Pasangan Berakte Nikah per 1000 Pasangan Penduduk Menikah

Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bahwa pada periode tahun 2017 persentase pasangan nikah non muslim yang belum berakte nikah tercatat sebesar 0 persen dari jumlah pasangan yang sudah menikah dengan kata lain seluruh pasangan nikah non muslim sudah memiliki akte nikah. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah masih tercatat sebanyak 11% dari jumlah pasangan sudah menikah sehingga terjadi kenaikan pengurusan akta nikah dari tahun 2016.

5) Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk

Kesadaran penduduk untuk mengurus akte kelahiran dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada periode tahun 2017 persentase penduduk yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 97% jiwa dari jumlah penduduk. Hal ini jauh melampaui target ditetapkan tahun 2017 sebesar 62%.

Tabel 2.23.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk
Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kepemilikan akta kelahiran penduduk	56,17%	54,42%	56%	56%	71%	97%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bintan, 2018

2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan

Untuk proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan sedikit mengalami penurunan dari 24% tahun 2012 menjadi 16% pada tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pencalonan dan besaran perolehan suara akhir untuk menduduki kursi legislatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2017 sebesar 16% kursi legislatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2017 sebesar 16% atau sebanyak 4 (empat) orang perempuan dari 25 orang anggota legislatif. Dibandingkan dengan Pemilu tahun 2012 jumlah yang duduk dilembaga legislatif 6 (enam) orang dari 25 anggota ini menurun sekitar 8%. Tidak terpenuhinya kuota pusat dimana 30% untuk perempuan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan partai politik, dan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik.

Tabel 2.24.
Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintan
Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan	24%	24%	16%	16%	16%	16%

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2016

2) Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kasus KDRT di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini dimana dari jumlah rumah tangga pada Tahun 2014 adalah 37.276 rumah tangga, terjadi kasus 3 kasus KDRT. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat 4 kasus KDRT dengan jumlah 40.000 rumah tangga. Sehingga angka rasio KDRT hanya sebesar 0,01 poin.

Hal ini menunjukkan KDRT masih dapat ditekan. Keberhasilan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak.

Tabel 2.25.

Rasio KDRT di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2018

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Rasio KDRT	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2018

Sampai dengan tahun 2018 persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak telah mencapai 100%.

2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Rasio akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Jumlah peserta KB di Kabupaten Bintan terus mengalami perkembangan yang berarti kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pencapaian kinerja Rasio Akseptor KB dari tahun 2012 sebesar 73,5 persen meningkat menjadi 82 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 51,16 persen. Penurunan ini disebabkan tidak adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB tentang pentingnya alat kontrasepsi bagi

Pemerintah Kabupaten Bintan

keluarga sasaran. Demikian pula belum dilakukannya pencatatan, pendataan maupun pelaporan oleh PLKB di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.26.

Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Akseptor KB	73,5	75	77,89	82,03	82,00	51,16

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2018

diganti dengan **Angka Pertumbuhan Penduduk**, pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,3 persen sedangkan tahun 2017 tercatat sebesar 3,65 persen.

2) Cakupan peserta KB aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014 meningkat signifikan sebesar 82,45% jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan SPM, maka cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan telah melampaui target. Demikian pula untuk capaian sampai dengan tahun 2017 tercatat 75,1% .

Tabel 2.27.

Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan peserta KB aktif	60%	75,3%	82,45%	77,1%	82%	75,1%

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2018

2.3.1.13 Sosial**1) Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)**

Indikator sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud adalah panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sangat diperlukan untuk pemberdayaan dan penanganan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun tidak hanya menambah sarana sosial tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan pada sarana sosial yang ada, seperti melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana sosial, semenisasi jalan menuju sarana sosial serta perbaikan sarana pendukung. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan jumlah sarana sosial pada tahun 2017 sebanyak 11 sarana sosial, meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu hanya sebanyak 5 sarana sosial.

Tabel 2.28.

Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah total sarana sosial (unit)	5	10	11	11	11	11

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2018

2) Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Pemerintah. Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberikan bantuan bagi PMKS mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2012 jumlah PMKS yang mendapat bantuan sebanyak 1.751 jiwa menjadi 8.173 jiwa pada tahun 2015. Angka ini termasuk kelompok keluarga miskin.

Sementara itu jumlah PMKS di luar keluarga miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2017 adalah 2.445 jiwa, yang ditangani atau diberi pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 278 orang atau (11,37%). Jika dibandingkan Tahun 2016 jumlah PMKS di luar fakir miskin cenderung menurun, tetapi dari segi capaian target rendah dan tidak tercapai. Hal ini disebabkan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini relative kecil, sehingga jangkauan pelayanan menjadi terbatas. Kendala lainnya adalah sumber daya manusia untuk menangani program ini masih terbatas.

Tabel 2.29.

Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial di Kabupaten Bintan
Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS	1.751 Jiwa	5.763	6.839	8.173	2.773	2.455

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2018

3) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam penanganan kesejahteraan sosial, diperlukan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam hal penanganan kemiskinan, Dinas Sosial telah melakukan pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (USEP) serta memberikan peningkatan kemampuan warga miskin untuk dapat mengakses permodalan atau pengembangan kegiatan usahanya melalui lembaga keuangan mikro (LKM) KUBE. Hal ini membuktikan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan taraf hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani sebesar 79,91%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sudah mencapai 26,62%, capaian ini melebihi dari target RPJMD Kabupaten Bintan dengan target yang direncanakan sebesar 45,28 persen.

Tabel 2.30.
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	26,62%	93	111,24	22	11,37	79,91

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2018

2.3.1.14 Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bintan selama periode 2015-2018 mengalami fluktuatif namun menunjukkan tren meningkat. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja Kabupaten Bintan yang terlibat dalam

kegiatan produktif. Jika pada tahun 2015 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** sebesar 62,83% maka pada tahun 2018 tercatat sebesar 65,01%.

Tabel 2.31.

Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Bintan Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018
1. Penduduk Usia Kerja (orang)	108.820	
2. Angkatan Kerja	67.678	
3. Bekerja	62.212	
4. Pengangguran	5.466	
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,19	65,01
6.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Rata-Rata Jam Kerja (jam/minggu)	8,08	

Sumber : diolah dari Sakernas, BPS Kabupaten Bintan/Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bintan Tahun 2018

Walaupun capaian kesempatan kerja telah cukup baik, namun tidak dapat disangkal bahwa tingkat pengangguran yang ada masih cukup banyak. Tahun 2017 tingkat pengangguran di Kabupaten Bintan mencapai 8,08%. Angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 7,39%.

Tingginya angka pengangguran ini diantaranya karena meningkatnya warga luar yang datang ke Kabupaten Bintan tanpa memiliki keterampilan khusus. Terhentinya eksplorasi tambang boksit sebagai konsekwensi ditutupnya perusahaan-perusahaan tambang sehingga terjadinya rasionalisasi pekerja sektor tambang. Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia juga berimbas kepada tutupnya beberapa pabrik di Lobam, selain itu tingkat persaingan yang tinggi dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi akan tingkat pengangguran yang ada. Pada aspek perlindungan ketenagakerjaan, telah dilakukan penyuluhan perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat, pemeriksaan terpadu norma kerja umum keselamatan dan kesehatan kerja, penyuluhan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis juga telah dilaksanakan penyuluhan lembaga kerjasama (LKS Bipartit).

Selama periode tahun 2015-2017 jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebanyak 50 kasus yang diselesaikan ditingkat perantara sebanyak 43 kasus dan jumlah kasus yang diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 7 kasus. Untuk kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 41 kasus, diselesaikan ditingkat perantara sebanyak 35 kasus dan yang diteruskan ke Pengadilan sebanyak 6 kasus.

Selama periode tahun 2018, Persentase kasus perselisihan pengusaha-pekerja yang terselesaikan adalah 92,6% atau 7,4% kasus perselisihan pengusaha-pekerja belum dapat diselesaikan.

Terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan menguatkan dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (*pro poor*).

Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Keberadaan Koperasi terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan *leader* perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital,

upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik tatanan makro maupun mikro.

Perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Seperti pada Tabel diatas, dari jumlah pelaku Usaha Mikro tahun 2016 sebanyak 1.980 unit usaha, sampai dengan tahun 2017 berkembang menjadi 2.140 unit usaha yang secara terperinci dapat dikatakan bahwa selama periode Tahun 2016-2017 terjadi pertambahan jumlah pelaku usaha sebanyak 160 unit usaha mikro dengan total persentase kenaikan sebesar 8 % dari Tahun 2016. Sedangkan kategori Usaha Kecil pada tahun 2016 berjumlah 485 unit usaha berkembang menjadi 560 usaha pada tahun 2017 atau bertambah sebanyak 75 unit usaha atau terjadi peningkatan sebesar 15,46% dari Tahun 2016. Disisi lain untuk kategori Usaha Menengah juga mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2016 terdapat 168 unit usaha dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 171 unit usaha dalam skala menengah atau terjadi pertambahan sebanyak 3 unit usaha dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,79% dari tahun 2016.

Tabel 2.32.

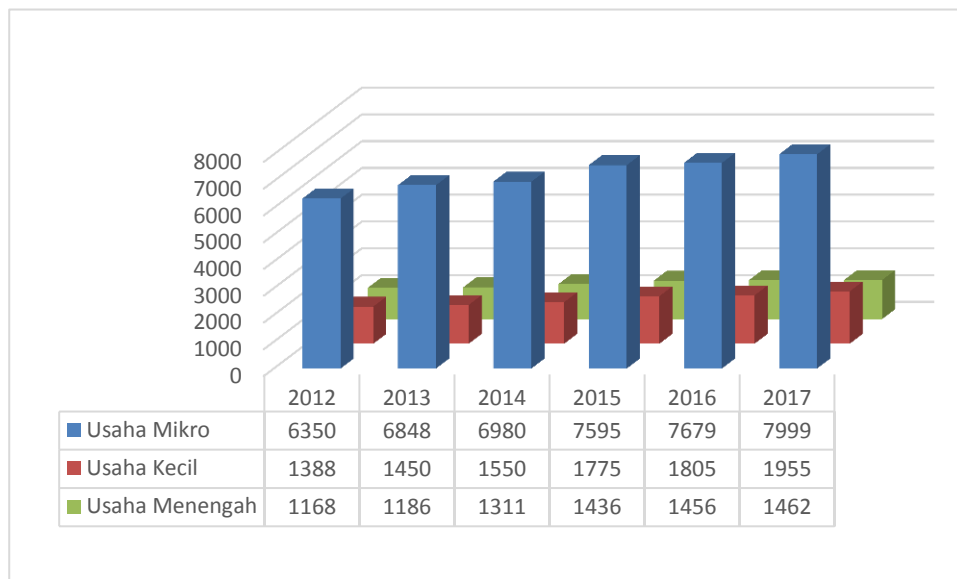
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2012-2017

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah koperasi/koperasi aktif	171/104 Unit	287/193	227/195	204/175	223/123	226/127
Persentase koperasi aktif	83,01%	139,32	85,90	85,78	55	56,2
Jumlah UMKM Aktif	1.485 Unit	1.593	1.675	1.880	2.655	2.871

Berdasarkan pengelompokan usaha menurut sektor terdapat lima sektor/kelompok usaha yaitu : sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan/peternakan dan sektor jasa. Berdasarkan Tabel 10 diatas pelaku UMKM yang terbanyak pada sektor

perdagangan dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 1.108 pelaku usaha yang terdiri dari 845 pelaku usaha pada usaha mikro, 184 pelaku usaha pada usaha kecil dan 79 pelaku usaha pada usaha menengah. Pada sektor industri terdapat 258 pelaku usaha yang terdiri dari pelaku usaha mikro 169 pelaku usaha, 68 pelaku usaha pada usaha kecil dan 21 pelaku usaha pada usaha menengah. Pada sektor pertanian/perkebunan terdapat 322 pelaku usaha yang terdiri dari 230 pelaku usaha mikro, 67 pelaku usaha kecil dan 25 pelaku usaha menengah. Pada sektor perikanan/peternakan terdapat 497 pelaku usaha yang terdiri dari 413 pelaku usaha mikro, 62 pelaku usaha kecil dan 22 pelaku usaha menengah. Sedangkan pada sektor jasa terdapat 308 pelaku usaha yang terdiri dari 223 pelaku usaha mikro, 63 pelaku usaha kecil dan 22 pelaku usaha menengah. Untuk dua tahun kebelakang 2016 dan 2017 belum ada datanya.

Gambar 2.12.
Jumlah Tenaga Kerja UMKM Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017



Dalam hal penyerapan tenaga kerja, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang cukup besar pada angkatan kerja di Kabupaten Bintan. Pada usaha mikro terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 6.350 tenaga kerja pada tahun 2012 menjadi 7.999 pada tahun 2017, terjadi pertambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.649

orang atau bertambah sebesar 25,97 %. Untuk usaha kecil pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.388 orang dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 1.955 orang atau terjadi pertambahan sebesar 567 orang atau bertambah sebesar 40,85 %. Sedangkan untuk usaha menengah pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.168 orang, bertambah menjadi 1.462 orang pada tahun 2017 atau terjadi pertambahan tenaga kerja sebanyak 294 orang tenaga kerja atau bertambah sebanyak 25,17 %. Secara total terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam rentang enam tahun dimana pada tahun 2012 berjumlah 8.906 orang meningkat menjadi 11.416 orang pada tahun 2017 artinya terjadi pertambahan tenaga kerja sebanyak 2.510 orang atau pertambahan sebesar 28.18 %.

Secara keseluruhan terbentuknya UMKM dan/atau Kelompok-kelompok yang berkembang di wilayah Kabupaten Bintan turut memberikan kontribusi sebesar 7,30 % terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bintan sebesar 156.313 jiwa yang terdaftar pada tahun 2017.

Tabel 2.33.
Data Penyebaran Umkm Per-Kecamatan Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	Tahun						Persentase
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Bintan Timur	125	175	360	514	571	640	412%
2.	Gunung Kijang	80	108	174	245	325	365	356%
3	Toapaya	35	48	75	135	135	165	371%
4.	Teluk Bintan	50	80	100	159	173	195	290%
5	Teluk Sebong	35	45	75	150	165	187	434%
6.	Bintan Utara	125	175	225	319	331	420	218%
7.	Seri Kuala Lobam	37	42	74	125	125	175	372%
8.	Bintan Pesisir	15	22	45	78	78	93	520%
9.	Mantang	20	35	65	105	105	121	505%
10.	Tambelan	25	65	70	98	110	110	340%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016

2.3.1.15 Penanaman Modal

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya

dilaksanakan melalui peningkatan investasi di Kabupaten Bintan. Untuk menumbuhkan minat investasi perlu didukung dengan memantapkan sistem administrasi pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan terciptanya lingkungan yang kondusif

Tabel 2.34.

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal, 2014-2018

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
Lama Proses Perizinan	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari	3-14 hari	1-17 hari	
Penyelesaian izin lokasi	100%	100	100	100	100	n/a
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	127/11 Investor	174/17	199/34	199/61	208/68	199/34
Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) dalam Juta USD	Juta USD 0,945	1,038	1,251	1,3	0,747	1,251
Rasio daya serap tenaga kerja	185	107	107	127	201	200
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)	Rp428,52 Milyar	1.457	1.457	475,26	462,65	

Perkembangan investasi di Kabupaten Bintan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Jumlah investasi PMDN pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,945 Juta USD dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,251 Juta USD. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja mencapai 200.

- 1) **Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)**, sampai dengan tahun 2018 jumlah investor PMA mencapai 199 perusahaan sedangkan PMDN berjumlah 34 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebanyak 127 PMA dan 11 PMDN.
- 2) Sementara itu besaran **Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN)** pada tahun 2018 mencapai USD\$1,251 ribu,

angka ini menurun bila dibandingkan dengan besaran investasi di Kabupaten Bintan tahun 2012 yang tercatat sebesar US\$945 ribu.

- 3) **Rasio daya serap tenaga kerja**, yaitu jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) yang terserap pada Perusahaan PMA dan PMDN yang telah beroperasi. dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi karena besaran rasio penyerapannya tergantung dengan jumlah perusahaan untuk tahun 2018 mencapai 200, artinya 1: 200.
- 4) **Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (dalam Milyar Rp)** memperlihatkan trend positif meningkat dimana pada tahun 2012 nilainya Rp.428,52 Milyar terus meningkat sehingga tahun 2017 mencapai Rp.462,65 Milyar.

2.3.1.16 Kebudayaan

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 setiap tahun diselenggarakan festival seni dan budaya. Penyelenggaraan seni dan budaya meliputi Festival Tari, Bintan Culture Festival, Pentas Kesenian Rakyat, Pentas Seni di Event Tour De Bintan, Panggung Seni dan Budaya Bintan di *Kite Tour De Asia* serta festival lainnya dalam rangka melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Bintan.

Tabel 2.35.
Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5 kali	3 kali	3 kali	8 kali	12 kali	10 kali
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	19 unit	8 unit	8 unit	21 unit	21 unit	21 unit

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Bintan tahun 2016

Sementara itu, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 sebanyak 19 unit berkembang

menjadi 21 unit pada tahun 2015.

Keberadaan benda cagar budaya menjadi salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Bintan. Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara, hingga tahun 2017 cagar budaya yang dilindungi serta dipelihara di Kabupaten Bintan berjumlah 14 situs.

Tabel 2.36.

Jumlah Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dipelihara di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara	1	6	6	14	14	14

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Bintan tahun 2018

2.3.1.17 Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif.

Persentase organisasi kepemudaan yang didata oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2018 telah mencapai 73% meningkat 13% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 65%. Secara berturut-turut, persentase organisasi kepemudaan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah 50%, 60% dan 65%.

Tabel 2.37.

Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun	Tahun		
		2016	2017	2018
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50%.	60%	65%	73%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bintan tahun 2018

2) Jumlah Klub Olahraga

Jumlah organisasi/klub olahraga juga terus bertambah sesuai dengan

pertumbuhan minat masyarakat di bidang olahraga hingga tahun 2015 jumlah klub olahraga yang terdaftar telah mencapai 215 klub. Untuk mendorong pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan cukup lengkap. Hingga tahun 2015 terdapat 19 organisasi olahraga di Kabupaten Bintan.

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda/pelajar yang diselenggarakan ditingkat desa/kelurahan hingga berskala nasional. Kegiatan yang melibatkan kepemudaan relatif meningkat dari tahun ketahun disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan.

4) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar

Untuk menggairahkan pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong pemerataan sarana dan prasarana olahraga baik melalui Pemerintah Daerah maupun Swasta di setiap kecamatan. Tahun 2017, setelah diverifikasi tercatat persentase sarana dan prasarana olah raga yang standar adalah 70%.

2.3.1.18 Kesatuan Bangsa

1) Kegiatan pembinaan terhadap LSM

Pada tahun 2018 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, pembinaan ini terhadap OKP dan LSM merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2010 Ormas dan OKP, Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Masyarakat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing.

Pemerintah Kabupaten Bintan

Tabel 2.38.
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di
Kabupaten Bintan Tahun 2012-2018

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2012	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 Keg.	3 Keg.	2 Keg.	6 Keg.	2 Keg.	1 Keg.	1 Keg.

Sumber : Badan Kesbang Linmas, Kab. Bintan tahun 2016

2) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pada tahun 2018 kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan seperti Verifikasi dan seleksi administrasi partai politik, Fasilitasi Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu yang Berkualitas Jujur dan Adil, Partisipasi Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Bintan. Pembentukan Tim Pemantuan Perkembangan Politik

Tabel 2.39.
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Bintan Tahun
2012-2018

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2012	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	5 Keg.	4 Keg.	2 Keg.	1 Keg.	1 Keg.	3 Keg.

Sumber : Badan Kesbangpol, Kab. Bintan tahun 2018

2.3.1.19 Ketahanan Pangan

1) Regulasi ketahanan pangan

Regulasi ketahanan pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Beberapa regulasi yang menjadi dasar kinerja dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bintan antara lain:

- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- SK Bupati Bintan Nomor.185 /IV/2009 tentang Pembentukan

Dewan Ketahanan Pangan

- Perbup Bintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2) Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat

Persentase ketersediaan pangan masyarakat (terutama sembilan pokok kebutuhan) yang ditargetkan dalam tahun 2018 adalah 100% pada realitasnya sudah tercukupi atau tercapai.

Ini disebabkan tingkat kebutuhan dan suplai 9 (Sembilan) bahan makanan pokok (sembako) di semua desa sudah tercapai, yaitu: beras, gula, minyak goreng, garam, cabai, tepung, bawang merah, daging dan telur.

2.3.1.20 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bintan masih mengalami stabilisasi pada kisaran 1 LPM. Sementara itu upaya pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberdayakan LSM juga ditunjukkan dengan meningkatnya 34 lembaga tahun 2010 menjadi 60 lembaga tahun 2015.

Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa lainnya ditunjukkan dengan jumlah PKK aktif. Kelompok/organisasi pemberdayaan perempuan yang biasanya terdapat di kelompok rumah tangga, mengalami perkembangan yang cukup tinggi sampai tahun 2013 yaitu mencapai 740 kelompok PKK aktif di Kabupaten Bintan. Sementara itu pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah PKK aktif menjadi 667 kelompok.

Dari 162 Posyandu yang ada di Kabupaten Bintan tahun 2015 semuanya aktif sesuai dengan fungsinya setiap bulan dan tetap dalam pengawasan Puskesmas setempat, dengan rincian sebagai berikut: Posyandu Purnama sebanyak 90,12%, Posyandu Mandiri sebanyak 9.87% (16 Posyandu) dan tidak ada lagi Posyandu dengan strata Pertama dan Madya. Meningkatnya jumlah posyandu didukung juga dengan adanya bantuan

pembangunan posyandu baru melalui dana APBD dan DAK anggaran pengentasan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Hampir seluruh Posyandu di Kabupaten Bintan telah memiliki bangunan permanen. Dari perkembangan jumlah posyandu tersebut, sudah seluruhnya merupakan posyandu aktif.

2.3.1.21 Statistik

Indikator kinerja untuk sub fokus statistik adalah keberadaan buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten. Buku Kabupaten Dalam Angka yaitu Buku Bintan Dalam angka sudah diterbitkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, yang dihasilkan dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini BPPPD Kabupaten Bintan bersama BPS Kabupaten Bintan.

Untuk tahun 2015, terkait dengan penerbitan Buku Bintan Dalam Angka kerjasama dengan BPS sudah tidak dilakukan lagi. Buku ini diterbitkan langsung oleh BPS.

2.3.1.22 Kearsipan

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Bintan. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Pengelolaan arsip di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari pencapaian

persentase pengelolaan arsip hingga tahun 2018 sudah mencapai 50% dari target 40%. Hal ini karena sudah meningkatnya SDM kearsipan di SKPD melalui pelatihan dan apresiasi kepada pimpinan. Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi kompetensi, sehingga perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis maupun pelatihan serta pengadaan tenaga ahli arsip yaitu arsiparis. Hal ini terlihat dari prosentase kegiatan pelatihan/bimtek.

Tabel 2.40.
Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2013-2018

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2012	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pengelolaan arsip secara baku	70%	40%	50%	80%	18	38	50
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0 Keg	3	3	4	1	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2016

2.3.1.23 Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi sudah mencapai target yaitu 6 provider (***XL, 3, Telkomsel, Indosat, Axis, Smart Fren***). Sementara itu, rasio jumlah jaringan komunikasi telah mencapai target yaitu 1,35. Jumlah Jaringan yang dimaksud adalah Jaringan Telkom. Dengan tersedianya layanan tersebut masyarakat semakin mudah menggunakan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) baik untuk berkomunikasi maupun mengakses internet dengan menggunakan telepon seluler serta *wifi (internet)*, dampak kemajuan serta kemudahan akses TIK ini juga mempengaruhi keberadaan usaha warnet / wartel yang terus berkurang.

Walaupun kemajuan TIK sangat cepat namun media surat kabar maupun majalah masih dipilih oleh masyarakat dalam mencari informasi. Jenis surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Bintan antara lain

Haluan Kepri, Batam Pos, Tanjung Pinang Pos, Kompas, dan sebagainya mengalami peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2015, jumlah surat kabar nasional yang beredar mencapai 15 jenis dan surat kabar lokal sebanyak 45 jenis.

Sarana komunikasi yang tak kalah pentingnya adalah Radio/TV. Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional yang melakukan penyiaran di Bintan terus bertambah seiring kemajuan teknologi dan informasi saat ini perusahaan penyiaran lokal yang beroperasi di Kabupaten Bintan adalah : Bintan TV/Bintan Radio, Batam TV, Kepri TV, TVRI, AN TV.

Website milik pemerintah daerah juga mengalami perkembangan, dari 16 situs pada tahun 2012 menjadi 44 situs pada tahun 2017.

2.3.1.24 Perpustakaan

Kabupaten Bintan belum mempunyai Perpustakaan Daerah yang representatif. Jumlah pengunjung perpustakaan se-Kabupaten Bintan baik Perpustakaan daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Mobil Keliling, Perpustakaan Kapal Apung dan Perpustakaan sekolah hingga tahun 2018 berjumlah 26.295 pengunjung. Sementara itu, koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bintan hingga tahun 2018 berjumlah 11.454 buku.

Tabel 2.41.
Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	16.987	6.064	15.564	16.777	26.295
Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	16.386	10.109	10.193	10.393	11.454

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2018

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

- **Tanaman Pangan;** Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor tersebut mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas dan kacang tanah. Kabupaten Bintan mempunyai potensi pertanian tanaman pangan yang cukup menjanjikan. Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini terlihat dari luas lahan potensi yang tersedia cukup luas, yaitu mencapai 1.623,7 Ha. Sementara itu, Padi kurang berpotensi di Bintan, dapat dilihat dari luas lahan sawah yang hanya tersebar di 2 kecamatan (Teluk Bintan, dan teluk Sebong) dengan total luas yang di usahakan hanya 40 hektar. Luas panen jagung tahun 2014 mencapai 223 Ha, dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yaitu 213 ha. Produktivitas ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan masing-masing 68,38%, 80,54%. Produktivitas kacang tanah mengalami penurunan 10,42% pada tahun 2014 apabila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2013.

- **Hortikultura;** Produksi tanaman sayuran pada tahun 2017 mencapai 15.109 ton, sedangkan pada tahun 2016 tercatat 20.571 ton. Pada tahun 2014 produksi tertinggi didominasi oleh ketimun, yakni sebesar 4.190,2 ton, kemudian diikuti kacang panjang sebesar 3.765,5 ton. Dan produksi terendah adalah jengkol yaitu hanya 21,92 ton. Produksi tanaman buah-buahan terdiri dari buah mangga, rambutan, nangka, pepaya, pisang, nenas, jeruk, durian, jambu, sawo, salak dan duku. Produksi buah terbanyak pada tahun 2014 adalah nangka yaitu mencapai 467,445 ton, diikuti pisang 420,305 ton.
- **Perkebunan;** Perkembangan luas areal dan produksi perkebunan rakyat tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 5.3.1. s.d. 5.3.8. Luas areal tanaman kelapa naik 11,99 persen yaitu dari 4.219

hektar tahun 2013 menjadi 4.725 hektar tahun 2014. Luas tanaman menghasilkan turun menjadi sebesar 2.072 Ha pada tahun 2014, dan produksinya naik menjadi 6.675,38 ton.

- **Kehutanan;** Luas hutan di kabupaten Bintan pada tahun 2014 sekitar 38.796,23 Ha. Semuanya termasuk hutan lindung, yang tersebar hampir disemua kecamatan. Hutan Lindung Gunung Bintan Besar di kecamatan Teluk Bintan seluas 280 Ha, Hutan Lindung Sei Jago di kecamatan Bintan Utara seluas 1.629,60 Ha, Hutan Lindung Gunung Bintan Kecil seluas 308 Ha di kecamatan Teluk Sebong, Hutan Lindung Gunung Lengkuas dan Hutan Lindung Sei Pulau masing-masing seluas 1.071,80 Ha dan 441,20 Ha di kecamatan Bintan Timur dan di kecamatan Gunung Kijang ada Hutan Lindung Gunung Kijang seluas 760 Ha.
- **Peternakan,** Populasi ternak besar terdiri dari sapi, kambing dan babi pada tahun 2014 secara berturut-turut adalah 742 ekor, 873 ekor, dan 1.380 ekor. Bila dibandingkan tahun sebelumnya populasi semua ternak besar mengalami penurunan pada tahun 2013. Populasi unggas (ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam kampung dan itik) pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Populasi ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam kampung dan itik tahun 2013 masing-masing berjumlah. 1.333.750 ekor, 218.850 ekor, 181.150 ekor dan 6.392 ekor.

Tabel 2.42.

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2010	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	5,74%	5,75	5.92	6.04	5.73	7.53

Sumber : Distanhut, Kab. Bintan tahun 2016

2) Nilai Tukar Petani

Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB).

Berdasarkan data NTP di Kabupaten Bintan, selama tahun 2010 sampai dengan 2014, NTP mencapai lebih dari 100, artinya petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibandingkan tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sampai dengan tahun 2014, NTP Kabupaten Bintan mencapai 109%. Namun pada tahun 2015 Nilai Tukar Petani mengalami penurunan, tercatat sebesar 98,99%.

Tabel 2.43.

Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Tukar Petani	104,76%	105,01%	109%	98,99%	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pertanian, Kab. Bintan tahun 2018

2.3.2.2 Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, menyediakan tenaga kerja, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup serta menstimulasikan sektor- sektor industri lainnya. Pengalaman di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu menstimulan industri lainnya seperti hotel atau penginapan, jasa travel, restoran, transportasi, industri kerajinan, industri makanan atau catering, pertanian, peternakan, perikanan serta jasa *tour guide*.

Arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan pada tahun 2015 mencapai 491.495 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 321.979 orang, Wisatawan Mancanegara yang datang sebagian besar berasal dari Singapura, Tiongkok dan Jepang. Sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 180.516. Sedangkan pada tahun 2017 total jumlah wisatawan yang berkunjung terus meningkat mencapai 722.284 orang, dengan Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian regional dan situasi keamanan daerah yang semakin kondusif.

Tabel 2.44.
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan
Tahun 2012- 2017

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Mancanegara	336.547	318.154	320.861	321.9799	308.964	364.483
Nusantara	37.745	48.428	49.161	180.516	268.863	357.801
Total	374.292	366.582	370.022	491.495	574.337	722.284

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Bintan tahun 2018

2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Dari sisi makro ekonomi sektor pariwisata memainkan peranan cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Nilai PDRB sektor pariwisata (Pajak Hotel Restoran dan Hiburan) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 tercatat 63,2 Miliar Rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2014 mencapai 93,6 Miliar Rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,64% dari total PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2010-2014. Untuk tahun 2017 mencapai 11,75%.

2.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Jenis bahan galian yang banyak di tambang adalah bauksit , kemudian pasir darat dan granit. PT. Antam Kijang yang merupakan perusahaan pertambangan bauksit pada tahun 2010 di tutup, karena selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan dari produksi maupun volume ekspor bauksit.

- Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kabupaten Bintan merupakan salah satu sektor yang kontribusinya cukup besar. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kontribusi pertambangan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena telah diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral di Dalam Negeri.

Tabel 2.45.

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Bintan
Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	11,96	10,91	10,73	10,62	9,94	3,73

Sumber : Distamben, Kab. Bintan tahun 2016

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang belum memiliki pengolahan mineral (khususnya bauksit), oleh sebab itu kegiatan pertambangan di Kabupaten Bintan dihentikan sementara. Dilihat dari besaran kontribusi tiap tahunnya, kontribusi sektor pertambangan cenderung menurun di tahun 2014 sebesar 9,94% dan pada tahun 2015 hanya mencapai 3,73.

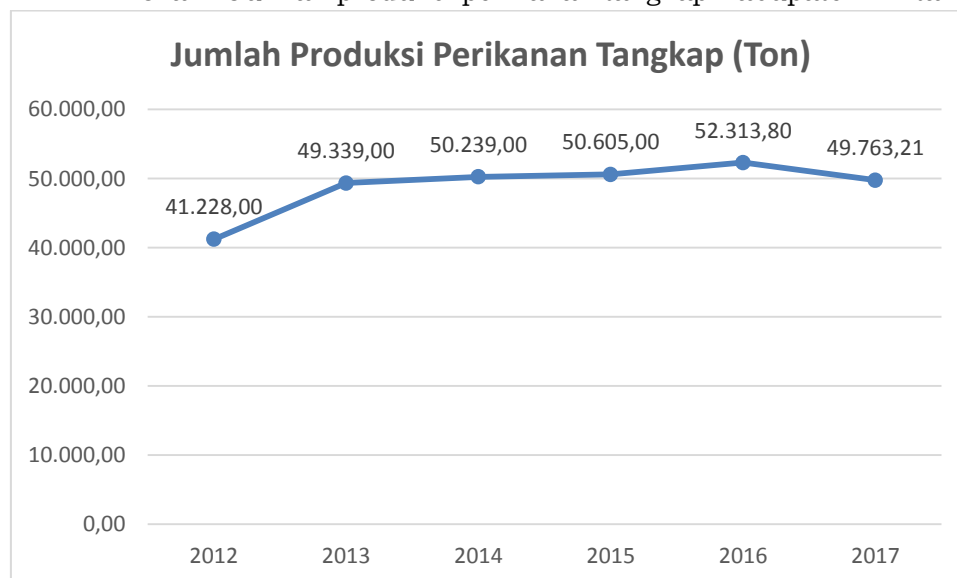
2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan yang lebih dari 98% luas wilayahnya lautan sangat kaya akan sumberdaya dan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan berdayakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Namun, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan sejauh ini belum dikelola secara maksimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut kedepan.

Perikanan; Volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 tercatat 49.763,21 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai produksi perikanan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 802,6 Milyar. Pada tahun 2014, jumlah rumah tangga perikanan di kabupaten Bintan sebesar 12.926. Tren ini terus naik sejak tahun 2002.

Gambar 2.13.

Grafik Jumlah produksi perikanan tangkap Kabupaten Bintan



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab. Bintan tahun 2018

2.3.2.5 Perdagangan

- **Neraca Perdagangan Luar Negeri**, Letak geografis Kabupaten Bintan diharapkan dapat dijadikan pintu keluar masuk perdagangan luar negeri, namun hal ini harus didukung fasilitas pelabuhan yang memadai. Neraca perdagangan luar negeri melalui pelabuhan di Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir menunjukkan angka negatif, dimana pada tahun 2017, tercatat US\$ – 940.985,09 juta.
- **Ekspor**, Pada tahun 2017, nilai ekspor melalui Kabupaten Bintan tercatat 295,31 juta US\$. Sejak lama Singapura merupakan pasar potensial bagi ekspor Bintan. Pada tahun 2017 volume ekspor yang dikirim ke Singapura sebesar 58.021,98 ton. Kemudian disusul oleh Malaysia sebesar 413,54 ton, masingmasing dengan nilai ekspor US\$278,75 juta dan US\$1,53 juta.
- **Impor**, Nilai impor pada tahun 2017 tercatat 1.236,30 juta US\$ atau naik sekitar 34,43 persen dibandingkan dengan tahun 2016 919,71 juta US\$. Jika dilihat volume import, negaranegara asal utama barang pada tahun 2017 masih didominasi oleh Singapura, Uni Emirat Arab dan Malaysia Volume impor dari Singapura mencapai 746.137,94 ton, Uni Emira Arab sebesar 414,01 ton dan Malaysia sebesar 215,17 ton. Pada periode yang sama nilai impor Bintan dari ketiga negara tersebut masingmasing; Singapura sebesar 533,64 juta US\$, Uni Emirat Arab sebesar 198,11 juta US\$ dan Malaysia sebesar 124,42 juta US\$.

2.3.2.6 Perindustrian

Sektor industri kini merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bintan. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir. Sebagai gambaran pada tahun 2017 peran industri pengolahan diperkirakan mencapai lebih dari setengah komponen pembentukan PDRB.

Industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Pengelompokan itu berdasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat didalamnya tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang digunakan ataupun modal yang ditanamkan. Pada tahun 2017 jumlah perusahaan industri besar/sedang mencapai 213 perusahaan dibandingkan tahun 2013. Sedangkan untuk jumlah perusahaan industri menengah mencapai 143, dan industri kecil sejumlah 409 perusahaan di tahun 2014.

2.4 Permasalahan Pembangunan

2.4.1. Pendidikan

1. Belum semua anak usia PAUD sekolah PAUD
2. Belum semua anak usia pendidikan dasar bersekolah SD/SMP
3. Belum semua anak putus sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan

2.4.2. Kesehatan

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (berPHBS).
2. Masih tingginya kasus penyakit menular yang dilaporkan: DBD, TB Paru dan HIV AIDS
3. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti; kanker, diabetes mellitus, Hipertensi, Stroke Kegagalan jantung, dan gangguan jiwa.
4. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
5. Masih kurang dan belum meratanya SDM Kesehatan.
6. Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Kesehatan
7. Meningkatnya persentase balita gisi buruk
8. Meningkatnya angka kematian bayi.

2.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. % tingkat kemantapan jalan belum optimal.
2. Masih belum optimalnya fungsi drainase;
3. Belum optimalnya pemeliharaan irigasi;
4. Belum terpenuhinya penduduk yang memiliki akses air bersih/minum;
5. Belum terpenuhinya penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik;
6. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;

2.4.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman kumuh,;
2. Belum terpenuhinya lingkungan permukiman yang sehat dan aman di dukung PSU;

2.4.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi.
2. Belum semua desa menjadi desa tangguh bencana
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran (gedung, mobil pemadam, personil) dan respon time sesuai zonasi penanganan

2.4.6. Sosial

1. Belum Optimalnya tingkat penanganan PMKS.

2.4.7. Tenaga Kerja

1. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran
2. Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja.

2.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
2. Belum optimalnya pemanfaatan data gender dan anak sebagai bahan dalam PPRG.

2.6.1. Pangan

1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan
2. Masih belum stabilnya harga dan pasokan pangan.
3. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar
4. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan

2.4.9. Pertanian

1. Potensi terjadinya konflik pertanian antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak lain cukup tinggi;

2.4.10. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas air, tanah dan udara yang belum diikuti dengan upaya pencegahan yang optimal
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah terpilah

2.4.11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk belum memiliki akta kelahiran.
2. Masih rendahnya kepemilikan akta kematian.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perubahan elemen data KK setiap kali terjadi perubahan data kependudukan.

2.4.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rendahnya keberdayaan masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan lembaga ekonomi desa.
3. Masih rendahnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan desa
4. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan desa.
5. Kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah.

- 2.4.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
1. Masih rendahnya partisipasi peserta KB Aktif
 2. Masih tingginya unmeet-need dan DO dalam ber-KB
- 2.4.14. Perhubungan**
1. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum.
- 2.4.15. Komunikasi dan Informatika**
1. Kurangnya kualitas koneksi jaringan;
 2. Kurangnya kualitas konten website pemerintah daerah;
 3. Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi;
 4. Kurangnya kualitas penyelenggaraan KIP;
- 2.4.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
1. Masih tingginya koperasi yang berada dalam kondisi tidak aktif.
 2. Semakin meningkatnya jumlah UMKM, namun pembinaan dan fasilitasi pengembangannya terhadap pelaku dan produk UMKM masih sangat terbatas.
- 2.4.17. Penanaman Modal**
- Upaya peningkatan Promosi Investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal
- 2.4.18. Pemuda dan Olahraga**
1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran pemuda dalam kegiatan kepemudaan.
 2. Belum optimalnya pengembangan olahraga prestasi
- 2.4.19. Statistik**
1. Masih adanya keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan
- 2.4.20. Persandian**
1. Belum semua OPD menggunakan persandian dalam surat menyurat
- 2.4.21. Kebudayaan**
1. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian cagar budaya yang ada menjadi wisata budaya.
 2. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya;
- 2.4.22. Perpustakaan**
1. Masih rendahnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan
- 2.4.23. Kearsipan**
1. Belum optimalnya manajemen arsip secara baku.
- 2.4.24. Kelautan dan Perikanan**
1. Belum optimalnya produksi perikanan, terutama perikanan budidaya.

2.4.25. Pariwisata

1. Masih belum optimalnya pengembangan potensi desa wisata.

2.4.26. Pertanian

1. **Sulitnya meningkatkan produksi pertanian utama**
2. Masih tingginya angka morbiditas ternak.

2.4.27. Perdagangan

1. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai ekspor.
2. Belum optimalnya tertib alat ukur.
3. Masih terbatasnya jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat.

2.4.28. Perindustrian

1. Belum optimalnya Persentase IKM bersertifikasi mutu produk
2. Belum optimalnya klaster industri yang berkembang.
3. Belum optimalnya pertumbuhan IKM.

2.4.29. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

1. Masih belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

2.4.30. Keuangan Daerah

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah (PAD);
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah;
3. Masih kurangnya kualitas pelaporan keuangan daerah;
4. Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel.

2.4.31. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

1. Masih belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Masih kurangnya SDM aparatur sesuai dengan formasi berdasarkan Anjab dan ABK.
3. Masih banyaknya ASN yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

2.4.32. Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi.
2. Belum seluruh PD memiliki standar operating prosedur (SOP) untuk meningkatkan pelayanan.

2.4.33. Inspektorat

1. Masih belum optimalnya akuntabilitas pemerintah
2. Masih belum optimalnya level APIP.
3. Masih adanya perangkat daerah dengan nilai AKIP di bawah kategori B.
4. Keterbatasan SDM dibidang pengawasan (Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah)

2.4.34. Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya proses legislasi di DPRD
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD.